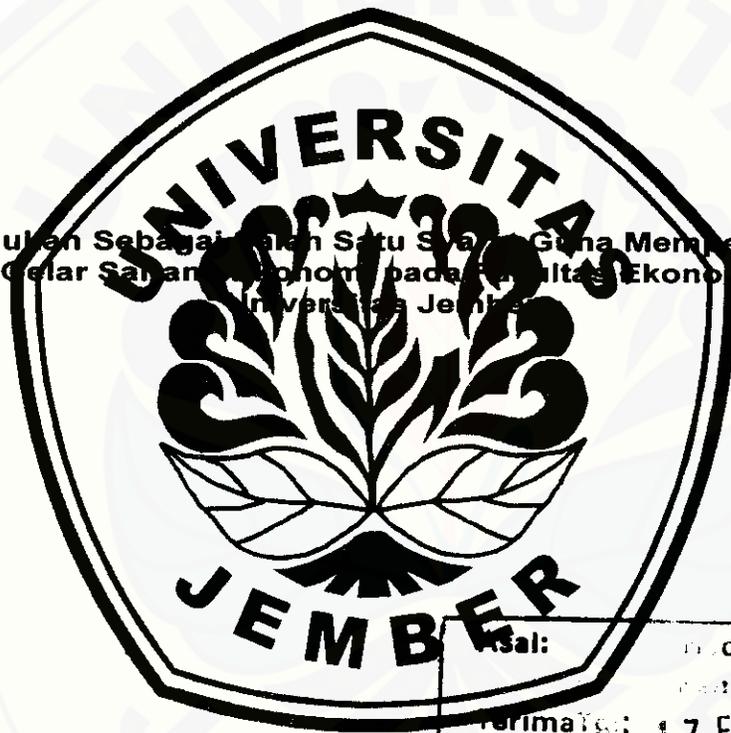




**ANALISIS KESENJANGAN PENDAPATAN DI WILAYAH  
GERBANGKERTASUSILA JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember



Oleh :

**EKO RIYANTO**

NIM : 990810101366

Kasal:

Perimatan:

No. Induk:

Pengantar:

Media:

Pembelian

17 FEB. 2004

Klass

339.4

RIY

a

PENGHANTUAN<sup>e</sup>

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2003**

## JUDUL SKRIPSI

ANALISIS KESENJANGAN PENDAPATAN  
DI WILAYAH GERBANGKERTASUSILA JAWA TIMUR

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : EKO RIYANTO

N. I. M. : 990810101366

J u r u s a n : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

23 DESEMBER 2003

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

### Susunan Panitia Penguji

Ketua,

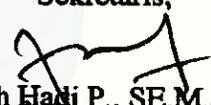


Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes

NIP. 131 624 478



Sekretaris,



Teguh Hadi P., SE, M.Si

NIP. 182 092 300

Anggota,



Drs. Rafael Purtono S., M.Si

NIP. 131 793 384

Mengetahui/Menyetujui

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi

Dekan,



Drs. Liakip, SU

NIP. 130 531 976



**TANDA PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Analisis Kesenjangan Pendapatan Di Wilayah  
Gerbangkertasusila Jawa Timur

Nama Mahasiswa : Eko Riyanto

Nim : 990810101366

Jurusan : Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan

Kosentrasi : Ekonomi Perencanaan dan Pengembangan Regional

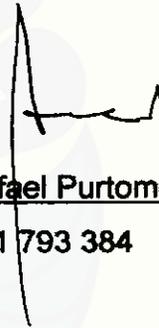
Pembimbing I



Drs. P. Edy Suswandi, MP

NIP. 131 472 792

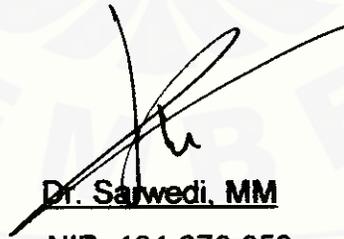
Pembimbing II



Drs. Rafael Purtono S. M.Si

NIP. 131 793 384

Ketua Jurusan



Dr. Sarwedi, MM

NIP. 131 276 658

Tanggal Persetujuan : Desember 2003

*HALAMAN PERSEMBAHAN*

*Karya sederhana ini aku persembahkan untuk:*

*Kedua orang tuaku, Ibunda Suyati dan Ayahhanda Ridjan*

*Istriku, Evi Hafidatul Khair*

*Ibu Nasiyah dan Bapak Ningwar di Bondowoso*

*Kakakku Hidayatul Choir di Bondowoso*

*Adik-adikku Dwi Sucahyono dan Tri Desi Ariani*

*Saudaraku dan teman-temanku*

*Almamaterku Universitas Jember*

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kesenjangan pendapatan yang ada di SWP I (GERBANGKERTASUSILA) Propinsi Jawa Timur dengan menggunakan alat analisis Indeks Williamson dan pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder selama kurun waktu 1996-2000.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat mengakibatkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor industri, perdagangan, dan jasa. Menurut Williamson dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat maka daerah yang tidak memiliki potensi guna mendukung perkembangan industri, tentunya akan tertinggal oleh perkembangan daerah lain dan mengakibatkan timbulnya daerah eksklusif terutama yang berorientasi ekspor.

Hasil Indeks Williamson untuk SWP I antara 1,59 sampai dengan 1,69 menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di SWP I adalah sangat tinggi. Penyebab terjadinya kesenjangan pendapatan ini adalah karena pendapatan di Kotamadya Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik sangat tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan kabupaten / kotamadya lainnya di SWP I. Hal ini terbukti setelah Kotamadya Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik dikeluarkan dari perhitungan ternyata Indeks Williamson untuk SWP I sebesar 0,30 sampai dengan 0,31. Oleh karena itu pola kebijaksanaan seyogyanya diarahkan pada daerah yang mempunyai pendapatan lebih rendah agar kesenjangan pendapatan dapat ditekan seminim mungkin.

Kata kunci : Kesenjangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya semata skripsi dengan judul Analisis kesenjangan Pendapatan Di Wilayah GERBANGKERTASUSILA Jawa Timur ini dapat terselesaikan sebagai tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak dalam mengatasi berbagai macam hambatan terutama keterbatasan penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Drs. P. Edi Suswandi, MP dan Drs. Rafael Purtono S, M.si atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Drs.H. Liakip, SU selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Dr.H. Sarwedi, MM dan Siswoyo Hari S., SE, M.si selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan IESP yang telah membantu kelancaran skripsi penulis.
4. Drs. Bambang Yudono, MM atas izin yang diberikan dan bimbingannya.
5. Dosen Fakultas Ekonomi khususnya jurusan IESP yang telah memberikan ilmunya selama ini.
6. Segenap Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
7. Istriku Evi Hafidatul Khair yang telah banyak membantu hingga terselesainya skripsi ini.
8. Keluarga di Surabaya : Ibu, Bapak, dik Yono, dik Ari, dan Lek Sami sekeluarga.
9. Keluarga di Bondowoso : Ibu Nasiyah, Bapak Ningwar, Mas Choir, dan Mbak Reri.
10. Mbak Ida, Mas Bedi, dik Fandi, dik Fifin di Sumber Alam Jember.
11. Teman-teman di Surabaya : Dwi Eko sekeluarga dan Topan sekeluarga.
12. Mbak Tik, Mas Joko, dik Lia, dan dik Bayu di Asrama Unej.

13. Teman-teman Asrama Unej : Yusuf, Mbah Dudung, Bang Tatang, Om Bash, prist dan Juli, Guntur, Nizar, Yus dan Pak Dion, Pur, Agung Bo, Yayan, Andi, Budi, Agung Mig, dan Wawan.
14. Teman-teman KSKIK : Arifin, Ngadimin, Yoyok, Hidayat, Artini, Tiko, Repto, Dona, Nungki, Novita, Irfan, Cholili, Heru, dan Ratri.
15. Teman-teman Kuliah Kerja : Mas Hadi, Mas Toni, Nining, Yeni, Erna, Anita dan Mbak Ike.
16. Teman-teman Himasurya, teman-teman Perisai Diri dan teman-teman kelasku "SP Genap 99".
17. Serta semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkeinginan menambah khasanah keilmuannya.

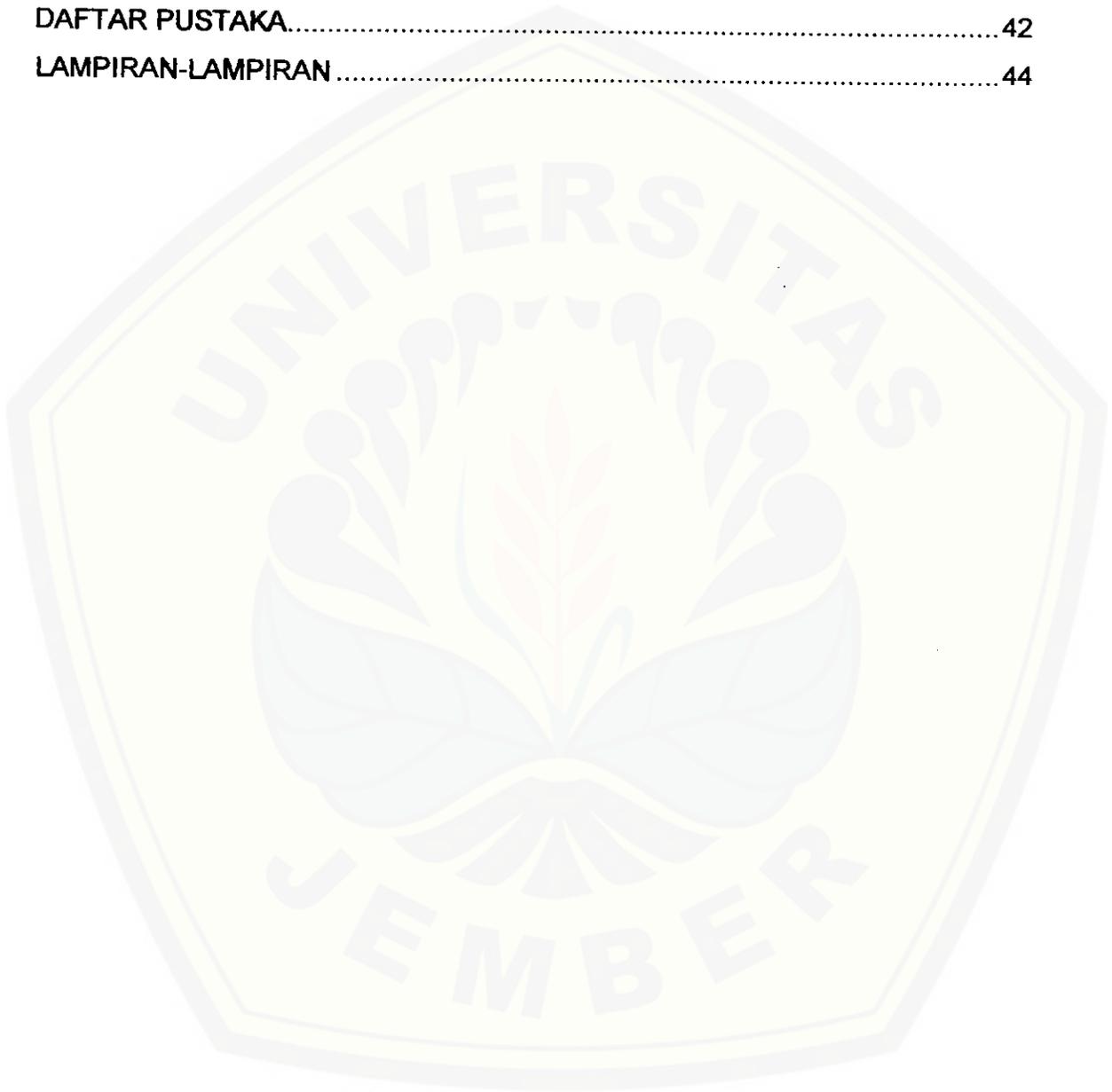
Jember, Desember 2003

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAKSI .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya.....	8
2.2 Landasan Teori.....	9
III. METODE PENELITIAN .....	22
3.1 Rancangan Penelitian.....	22
3.2 Populasi.....	23
3.3 Prosedur Pengumpulan Data.....	23
3.4 Metode Analisis Data .....	24
3.5 Definisi Variabel Operasional.....	25
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	26
4.1 Gambaran Umum Wilayah.....	26
4.2 Analisis Data .....	32
4.3 Pembahasan .....	37

V. KESIMPULAN DAN SARAN .....	40
5.1 Kesimpulan .....	40
5.2 Saran .....	41
DAFTAR PUSTAKA .....	42
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	44



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : PDRB Daerah-Daerah Tingkat I di Pulau Jawa Berdasarkan Harga Konstan 1993 Tahun 1994-1998 .....	4
Tabel 2 : Luas Wilayah Masing-Masing Kabupaten/Kotamadya di SWP I Menurut Struktur Penggunaan Lahan Tahun 2000 .....	26
Tabel 3 : Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk di SWP I Jawa Timur Tahun 2000.....	27
Tabel 4 : Tingkat Pertumbuhan Penduduk Pada Tiap-Tiap Kabupaten / Kota di SWP I selama kurun waktu 1996-2000 .....	28
Tabel 5 : Persentase Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Penduduk Usia 10 Tahun Ke-atas di SWP I Tahun 2000.....	29
Tabel 6 : Peranan Sektoral & Sumber Mata Pencaharian Penduduk di SWP I Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2000.....	30
Tabel 7 : Komposisi PDRB Masing-Masing Kabupaten/Kotamadya di SWP I Atas Dasar Harga Konstan 1993, Periode 1996-2000 .....	31
Tabel 8 : Pertumbuhan Ekonomi Masing-Masing Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan 1993 di SWP I Tahun 1996-2000 .....	32
Tabel 9 : Pertumbuhan Ekonomi Pada Pusat-Pusat Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 1993 di SWP I Tahun 1996-2000 .....	33
Tabel 10 : Pertumbuhan Ekonomi Pada Wilayah <i>Hinterland</i> Atas Dasar Harga Konstan 1993 di SWP I Tahun 1996-2000 .....	34
Tabel 11 : Hasil Indeks Williamson SWP I (GERBANGKERTASUSILA) Propinsi Jawa Timur Tahun 1996-2000 .....	35
Tabel 12 : Hasil Indeks Williamson SWP I Tahun 1996-2000 (Tanpa Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik).....	36
Tabel 13 : Hasil Indeks Williamson Pada Pusat-Pusat Pertumbuhan Di SWP I Propinsi Jawa Timur Tahun 1996-2000.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Luas Wilayah masing-masing Kabupaten / Kota Di SWP I Menurut Struktur Penggunaan Lahan tahun 2000.....	44
Lampiran 2 : Jumlah Penduduk Akhir Tahun Menurut Kabupaten / Kota Di SWP I Jawa Timur Tahun 1996-2000.....	45
Lampiran 3 : Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Di SWP I Jawa Timur Tahun 2000.....	46
Lampiran 4 : Persentase Sumber Mata Pencaharian Penduduk Usia 10 Tahun Ke-atas Menurut Lapangan Usaha Utama di SWP I Jawa Timur Tahun 2000 .....	47
Lampiran 5 : Persentase Peranan Sektoral (NTB) SWP I Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2000.....	48
Lampiran 6 : PDRB Masing-Masing Kabupaten / Kotamadya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 di SWP I Propinsi Jawa Timur Tahun 1996-2000.....	49
Lampiran 7 : Pendapatan Perkapita Masing-Masing Kabupaten / Kota Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Di SWP I Jawa Timur Tahun 1996-2000.....	50
Lampiran 8 : Perhitungan dan Hasil Indeks Williamson.....	51

kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Pembangunan ekonomi akan membawa (inherent) ketimpangan regional apabila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh dan hati-hati, sehingga untuk menghindari hal tersebut strategi yang diambil adalah dengan perencanaan pembangunan (Tim P4N-UGM dan Bappeda Tingkat I Jawa Tengah, 1997:1-2).

Pembangunan daerah dalam pembangunan jangka panjang diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan otonomi daerah secara nyata, luas, dinamis, serasi, bertanggung jawab, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional, oleh karena itu keberhasilan pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan keberhasilan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan daerah dengan segala potensi yang dimiliki dalam percepatan pembangunannya selama kurun waktu tertentu akan menjadi modal dasar dan faktor dominan bagi pembangunan pada tahap berikutnya.

Daerah pada hakekatnya merupakan suatu lingkungan kegiatan ekonomi yang menjalankan fungsinya sebagai penghasil barang dan jasa, sebagai sumber pendapatan, dan lapangan kerja. Oleh sebab itu kebijakan dan program-program pembangunan sektoral harus diserasikan dengan potensi dan permasalahan masing-masing daerah. Daerah satu dengan daerah yang lain memiliki suatu keterkaitan dan ketergantungan, sehingga pembangunan yang berlangsung pada suatu daerah tidak hanya akan memberikan manfaat bagi daerah yang bersangkutan, melainkan akan bermanfaat pula bagi daerah lain.

Pembangunan ekonomi mensyaratkan Gross National Product (GNP) yang tinggi, untuk itu tingkat pertumbuhan yang tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi masalah bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak

menikmati hasil-hasilnya. Penanggulangan kemiskinan / kesenjangan pendapatan kini merupakan masalah pokok dalam pembangunan dan sasaran utama kebijaksanaan pembangunan di banyak negara. Hal ini selalu terjadi karena pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu berlangsung sistemik. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan yang cepat sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat (Todaro,2000:177).

Salah satu tujuan dari kebijakan pembangunan wilayah dalam konsepsi keruangan (spasial) adalah mengurangi perbedaan dalam tingkat perkembangan atau pembangunan dan tingkat kemakmuran antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah, salah satu indikatornya adalah tingkat PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang sekaligus berfungsi sebagai tolak ukur dalam melihat tingkat kemakmuran daerah. Hal ini karena PDRB menunjukkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dengan dukungan faktor-faktor produksi wilayah itu (Anonim,1985:4).

Tinggi rendahnya tingkat PDRB masing-masing daerah baik PDRB yang diukur berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendapatan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Semakin besar perbedaan PDRB suatu daerah dengan daerah yang lainnya, maka kesenjangan pendapatan antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya semakin tinggi.

Propinsi Jawa Timur mempunyai daerah-daerah kaya, namun juga memiliki sejumlah daerah yang sangat miskin dengan lokasi yang relatif terpencil, seperti daerah pegunungan kapur di sebelah barat daya dan pulau Madura yang belum mampu memberikan andil yang cukup dalam pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh terhadap pendapatan propinsi Jawa Timur.

Jawa Timur berada pada peringkat ketiga PDRB tertinggi di pulau Jawa setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta pada tahun 1994-1998. PDRB Jawa Timur pernah berada pada peringkat pertama (tertinggi) di pulau Jawa pada tahun 1971,1976,1981, dan 1984, sedangkan pada tahun 1985-1988 PDRB Jawa

Timur berada pada peringkat kedua. Hal ini menandakan bahwa prestasi Jawa Timur terus mengalami penurunan selama kurun waktu tersebut apabila dibandingkan dengan daerah tingkat I lainnya di pulau Jawa yang sekaligus menunjukkan terjadinya pergeseran pendapatan antar propinsi.

Perkembangan PDRB propinsi-propinsi di pulau Jawa pada tahun 1994-1998 dapat diketahui pada tabel 1. Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa

**Tabel 1 : PDRB Daerah-Daerah Tingkat I Di Pulau Jawa Berdasarkan Harga Konstan 1993 Tahun 1994-1998 (%).**

No	Tahun	Propinsi (Daerah Tingkat I)					Total <sup>a)</sup>
		1	2	3	4	5	
1.	1994	27,03	27,46	17,70	2,14	25,67	100
2.	1995	27,08	27,90	17,43	2,12	25,47	100
3.	1996	27,21	28,07	17,22	2,10	25,40	100
4.	1997	27,33	28,12	16,95	2,11	25,49	100
5.	1998	26,88	27,57	17,83	2,24	25,48	100
	Rata-rata <sup>a)</sup>	27,11	27,82	17,43	2,14	25,50	100

**Keterangan :** 1: DKI Jakarta, 2: Jawa Barat, 3: Jawa Tengah, 4: DI Yogyakarta, 5: Jawa Timur.

<sup>a)</sup> Dalam Hitungan Trilyun Rupiah

**Sumber :** Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur, Tahun 1994-1998.

PDRB terbesar berturut-turut dalam kurun waktu 1994-1998 adalah Jawa Barat dengan rata-rata PDRB sebesar 27,82 persen pertahun, kemudian DKI Jakarta dengan rata-rata PDRB sebesar 27,11 Persen pertahun, selanjutnya Jawa Timur dengan rata-rata PDRB 25,50 Persen pertahun. Peringkat selanjutnya diduduki oleh Jawa Tengah dengan rata-rata PDRB sebesar 17,43 Persen pertahun dan DI Yogyakarta dengan rata-rata PDRB sebesar 2,14 Persen pertahun. Pada tahun 1994-1997 PDRB masing-masing propinsi dalam tabel 1 rata-rata memperlihatkan peningkatan dari tahun-ketahun kecuali Jawa Tengah, tetapi pada tahun 1998 masing-masing PDRB daerah Tingkat I (propinsi) dalam tabel 1 di atas rata-rata menunjukkan penurunan kecuali Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Hal ini dikarenakan adanya krisis ekonomi yang menghancurkan sektor sekunder pada daerah-daerah maju seperti DKI Jakarta,

Jawa Barat, dan Jawa Timur sehingga daerah yang perekonomiannya kurang dominan ditopang oleh sektor sekunder seperti Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengalami kenaikan kontribusi pendapatan.

Perbedaan Produk Domestik Regional Bruto yang mencolok dan pergeseran pendapatan antar daerah tingkat I pada pulau Jawa di atas, disebabkan karena pesatnya perkembangan sektor sekunder dan tersier dalam suatu daerah atau wilayah yang bersangkutan. Semakin pesat perkembangan sektor sekunder dan tersier dalam suatu daerah terhadap daerah lainnya, akan mengakibatkan kesenjangan yang semakin tajam antar daerah tersebut. Hal ini dapat diketahui dari kontribusi masing-masing sektor terhadap peningkatan PDRB suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain. Semakin besar kontribusi sektor sekunder dan tersier dalam peningkatan PDRB suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya akan menyebabkan kesenjangan pendapatan antar wilayah.

Propinsi Jawa Timur dikelompokkan dalam 9 Satuan Wilayah Pembangunan (SWP). SWP I biasa dikenal dengan sebutan GERBANGKERTASUSILA, yang meliputi : Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya. SWP II meliputi : Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep. SWP III meliputi : Kabupaten Banyuwangi. SWP IV meliputi : Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo. SWP V meliputi : Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo. SWP VI meliputi : Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, Kota Pasuruan. SWP VII meliputi : Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kota Kediri, Kota Blitar. SWP VIII meliputi : Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, dan Kota Madiun. SWP IX hanya meliputi dua kota yaitu : Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban (Bapeprop, 1997:28).

Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan keseimbangan pertumbuhan antar daerah, memperkokoh kesatuan ekonomi nasional, mencapai pertumbuhan ekonomi yang efisien. Kesemuanya itu dilakukan dalam upaya menuju pemerataan pembangunan daerah dan mencapai sasaran pembangunan daerah yang lebih terarah dan terkoordinasi serta merupakan strategi pembangunan regional yang diperlukan dalam melengkapi strategi pembangunan sektoral. Dipadukannya strategi pembangunan regional dan sektoral tersebut diharapkan akan dapat menciptakan hasil-hasil pembangunan yang efisien dengan sasaran pembangunan yang tepat bagi setiap daerah. SWP ini mengelompokkan beberapa daerah dalam satu-satuan wilayah pembangunan berdasarkan pada mekanisme pengembangan wilayah yang bertumpu pada sistem daerah nodal atau simpul-simpul daerah yang tercipta melalui daerah-daerah tersebut dalam mendistribusikan barang dan jasa.

Berdasarkan struktur pembagian Satuan Wilayah Pembangunan (SWP), Surabaya dan sekitarnya dikelompokkan dalam Satuan Wilayah Pembangunan I (SWP I) Jawa Timur yang meliputi wilayah GERBANGKERTASUSILA. Pembentukan SWP tersebut mempunyai harapan bahwa kegiatan pembangunan yang berpusat pada pusat pertumbuhan mempunyai pengaruh yang positif terhadap perkembangan daerah belakang (*hinterland*), sehingga pada akhirnya membentuk pusat-pusat pertumbuhan dalam suatu ruang ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur khususnya SWP I sangat pesat. Kenyataan ini dapat diketahui dengan semakin berkembangnya sektor sekunder dan tersier. Sektor primer mencakup sektor pertanian, pertambangan dan penggalian; sektor sekunder meliputi kegiatan industri, listrik, gas dan air, serta konstruksi; sedangkan sektor tersier meliputi kegiatan perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan serta kegiatan jasa-jasa. Perkembangan sektor sekunder dan tersier yang cukup pesat pada suatu daerah atau wilayah akan mengakibatkan terjadinya pergeseran pendapatan yang akan berlanjut pada terjadinya kesenjangan pendapatan antar daerah.

## 1.2 Perumusan Masalah

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat tergantung pada keadaan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi di wilayah GERBANGKERTASUSILA menunjukkan adanya peningkatan yang pesat yang ditandai dengan berkembangnya kegiatan di sektor sekunder dan tersier khususnya kegiatan industri dan perdagangan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang demikian dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendapatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah pada SWP I (GERBANGKERTASUSILA) Propinsi Jawa Timur.
2. Bagaimanakah kesenjangan pendapatan di GERBANGKERTASUSILA (SWP I) Propinsi Jawa Timur.

## 1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah pada SWP I (GERBANGKERTASUSILA) Propinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui tingkat kesenjangan pendapatan di SWP I (GERBANGKERTASUSILA) Propinsi Jawa Timur.

### Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak pengambil keputusan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menentukan pola kebijaksanaan ekonomi daerah.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mendalami masalah yang sama atau yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.



## I. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Drs. Badjuri pada tahun 1992 yang berlokasi di Karesidenan Besuki, dengan judul "Kesenjangan Pendapatan Antar Daerah Tingkat II Di Karesidenan Besuki Propinsi Jawa Timur". Pada penelitian tersebut diperoleh kesimpulan berdasarkan perhitungan Indeks Williamson yang dilakukan di Karesidenan Besuki dalam kurun waktu tahun 1986-1990 berkisar antara 0,40-0,58. Sebagai pedoman untuk mengetahui bagaimana kesenjangan pendapatan yang terjadi di masing-masing daerah Karesidenan Besuki, maka perlu melihat indeks Williamson nasional dan Propinsi. Indeks Williamson nasional menurut hasil penelitian team Unibraw, Malang 1990 sebesar 0,4 sedangkan indeks Williamson untuk Jawa Timur 0,6. Dengan demikian indeks Williamson Karesidenan Besuki masih berada di bawah indeks Williamson Jawa Timur dan diatas indeks Williamson nasional. Hal ini berarti tingkat kesenjangan pendapatan antar daerah tingkat II di Karesidenan Besuki masih tergolong tinggi. Penyebab terjadinya kesenjangan pendapatan tersebut karena pendapatan kabupaten Banyuwangi dan kabupaten Jember lebih mencolok dibandingkan dua kabupaten lainnya.

Imam Budi Hartono dalam penelitian serupa yang berjudul "Kesenjangan Pendapatan Antar Daerah Di Jawa Timur Tahun 1990-1993", menyebutkan bahwa indeks Williamson propinsi Jawa Timur untuk Tahun 1990-1993 berturut-turut 1,33; 1,36; 1,39; 1,43, sedangkan nilai indeks Williamson nasional yang dilakukan BPS berkisar antara 0,6-0,7. Hal ini membuktikan bahwa kesenjangan pendapatan antar daerah sangat besar di propinsi Jawa Timur. Jika daerah-daerah yang mempunyai sektor industri dan daerah-daerah yang PDRB-nya tinggi dikeluarkan dari perhitungan ternyata nilai indeks Williamson Jawa Timur turun drastis menjadi 0,49; 0,49; 0,50; 0,52 di bawah indeks Williamson nasional. Hal tersebut menunjukkan keseimbangan pendapatan antar daerah di Jawa Timur dan sekaligus membuktikan bahwa dengan timbulnya daerah-daerah industri mengakibatkan banyak daerah tidak dapat

mengimbangi pertumbuhannya. Pertumbuhan yang pesat beberapa daerah di Jawa Timur khususnya sektor industri mengakibatkan kesenjangan yang lebar di Jawa Timur. Pernyataan tersebut merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan yang pesat yang pada sisi lain pemerataan akan menjadi korban.

Sri Nurul Syamsiyah (1998) melakukan penelitian sejenis lainnya yang berjudul "Kesenjangan Pendapatan Di Wilayah Pembangunan Utama D (WPUD) Tahun 1993-1995". WPUD meliputi wilayah propinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Surabaya sebagai pusat pengembangannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, indeks Williamson pada daerah WPUD ternyata relatif sama bila dibandingkan dengan indeks Williamson nasional. Indeks williamson pada WPUD berkisar antara 0,50-0,60, sedangkan indeks Williamson nasional berkisar antara 0,6-0,7. Hal ini berarti kesenjangan pendapatan pada WPUD sama bila dibandingkan dengan kesenjangan pendapatan pada tingkat nasional. Kesenjangan yang cukup mencolok ini disebabkan karena diantara masing-masing propinsi mempunyai PDRB yang jauh berbeda. PDRB Jawa Timur dan Kalimantan Timur jauh lebih besar bila dibandingkan dengan PDRB propinsi lainnya pada WPUD. Hal tersebut karena Kalimantan Timur mempunyai sumber tambang migas yang cukup besar, sedangkan Jawa Timur selain mempunyai tambang migas juga mempunyai sektor industri yang jauh lebih maju bila dibandingkan dengan propinsi lain pada WPUD.

## 2.2 Landasan Teori

### Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya ada pada tiga aspek, yaitu : proses, output perkapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses bukan gambaran ekonomi pada suatu saat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Aspek kedua pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Output perkapita adalah total output dibagi jumlah penduduk. Proses kenaikan output perkapita harus

dianalisa dengan jalan melihat total output di suatu pihak dan jumlah penduduk di pihak lain. Aspek ketiga pertumbuhan ekonomi adalah prospektif jangka panjang. Suatu perekonomian tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama mengalami kenaikan output perkapita. Beberapa ekonom berpendapat bahwa adanya kecenderungan bagi output perkapita saja tidaklah cukup, mereka memberikan persyaratan yang lebih ketat kepada pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut tafsiran ini dikatakan apabila terjadi kecenderungan output perkapita untuk naik yang bersumber dari proses intern perekonomian tersebut. Kecenderungan tersebut haruslah berasal dari kekuatan dalam perekonomian itu sendiri, bukan berasal dari luar dan bersifat sementara. Proses pertumbuhan ekonomi harus bersifat *Self Generating* yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu sendiri menimbulkan kekuatan atau momentum bagi timbulnya kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya (Boediono, 1985:2).

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan pertumbuhan PDRB suatu daerah atau wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting untuk mengukur ada tidaknya pembangunan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam satu periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari waktu sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan (PDRB) suatu wilayah atau daerah dari tahun-ke tahun. (Arsyad, 1999:15).

Menurut Ardani (1992:15), Pada dasarnya teori-teori yang mengemukakan tentang pertumbuhan suatu daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu pertama, *inward looking theory*, menganalisis pertumbuhan yang diakibatkan oleh intern daerah itu sendiri misalnya *the export base theory* dan *the sector theory*. Kedua *outward oriented theory* yang menekankan pada

mekanisme yang mendasari penurunan pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah ke daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan suatu daerah tidak terlepas dari pertumbuhan daerah lain. Perbedaan pertumbuhan daerah yang mencolok pada gilirannya akan menyebabkan kesenjangan pendapatan yang akan merugikan pembangunan nasional.

### **Produk Domestik Regional Bruto**

PDRB adalah nilai produk barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu wilayah (daerah) dari suatu negara ditambah dengan hasil produksi barang-barang dan jasa-jasa dari modal asing yang bekerja di wilayah tersebut dalam jangka waktu satu tahun. Barang dan jasa akhir yang dimaksud di sini adalah barang dan jasa yang sudah berada pada konsumen akhir, sehingga tidak ada penambahan hasil lagi. Oleh karena itu besaran PDRB dalam periode tertentu sering digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja pelaku ekonomi di suatu wilayah terutama yang berkaitan dengan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang ada (Bappeprop,2000:28)

PDRB menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai pada suatu tahun tertentu. Perubahan nilai PDRB yang terjadi dari tahun ke tahun disebabkan oleh dua faktor, yaitu perubahan tingkat kegiatan ekonomi dan perubahan harga-harga. Adanya pengaruh dari faktor yang kedua diatas disebabkan oleh penilaian PDRB tersebut menurut harga berlaku pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah suatu perekonomian mengalami perkembangan atau tidak, perlu ditentukan perubahan yang sebenarnya terjadi dalam kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai pendapatan pada berbagai tahun harus dihilangkan. Hal ini dilakukan dengan cara menghitung pendapatan nasional menurut harga konstan . (Arsyad, 1999:15-16).

### A. Jenis-jenis PDRB

Secara berkala, PDRB dapat disajikan dalam 2 (dua) bentuk (Bappeprop dan BPS, 1997:4)

1. PDRB atas dasar harga berlaku; yaitu semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran PDRB.
2. PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dasar; yaitu semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar (dalam penelitian ini harga konstan didasarkan pada harga tahun 1993). Karena menggunakan harga tetap, maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan oleh perkembangan riil dari kuantum produksi tanpa mengandung fluktuasi harga.

### B. Manfaat PDRB

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto mempunyai manfaat atau kegunaan bagi berbagai pihak yang dapat dikelompokkan menjadi 4 (Partadiredja, 1983:12) :

1. Mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian suatu daerah. Artinya dari perhitungan PDRB dapat diketahui apakah suatu daerah tersebut merupakan daerah pertanian, industri, perdagangan, atau jasa. Dengan dasar perhitungan tersebut dapat pula diketahui ke arah mana perekonomian daerah tersebut bergerak dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu yang telah ditargetkan dalam suatu program pembangunan. Hal ini tergantung pada angka-angka yang telah diambil, sehingga mampu memberi kesimpulan yang benar.
2. Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu.  
Artinya dalam perhitungan PDRB angka yang dicatat merupakan penjumlahan angka-angka selama jangka waktu tertentu misalnya satu

tahun, sehingga dengan demikian kita dapat membandingkan dari tahun ke tahun. Perbandingan tersebut dapat memberikan keterangan apakah ada kenaikan atau penurunan, apakah ada perubahan struktur ekonomi atau tidak, apakah ada peningkatan kemakmuran atau tidak, dan bila dihubungkan dengan jumlah penduduk apakah ada kenaikan pendapatan perkapita riil. Angka perbandingan tersebut dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dalam melaksanakan program pembangunan selanjutnya.

3. Membandingkan perekonomian antar daerah .

Perhitungan PDRB dapat digunakan pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan dalam menentukan program pembangunan daerah dengan cara membandingkan PDRB suatu daerah dengan daerah lain. Perbandingan PDRB antar daerah ini sangat penting karena dengan membandingkan PDRB tersebut dapat diketahui tingkat kemajuan suatu daerah dibandingkan daerah lain, apakah termasuk kriteria daerah maju atau daerah yang masih terbelakang. Perbandingan PDRB antar daerah tersebut sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemajuan dan kesenjangan pendapatan yang terjadi antar daerah.

4. Merumuskan kebijaksanaan pemerintah

Angka perhitungan PDRB yang dicatat merupakan angka yang berguna pula untuk membantu dalam merumuskan kebijaksanaan pemerintah daerah. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah PDRB. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan pertumbuhan PDRB, sehingga dengan mengetahui besarnya PDRB dapat pula ditentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan dalam proses pembangunan sebelumnya dan bagaimana komposisinya pada tiap-tiap sektor ekonomi. Dengan peningkatan pendapatan perkapita, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai bagaimana seharusnya kebijaksanaan daerah dan penggunaan dana investasinya. Seperti telah disebutkan di depan

maka dalam hal ini ada beberapa kelemahan yang harus diperhatikan, misalnya keseragaman perekonomian, barang-barang dan jasa-jasa yang tidak dikonsumsi di pasar serta rendahnya pendapatan perkapita.

### C. Metode perhitungan PDRB

Ace Partadiredja menyebutkan ada tiga metode yang digunakan untuk menghitung besarnya Produk Domestik Regional Bruto, yaitu :

1. Pendekatan Produksi (*Production Approach*), yaitu bahwa PDRB merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah (regional) tertentu selama satu periode tertentu. Dalam pendekatan ini, perhitungan PDRB seluruh lapangan usaha dibagi menjadi sembilan sektor ekonomi/usaha, yaitu : (1) Pertanian, (2) Pertambangan dan Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Listrik, gas, dan Air Bersih, (5) Konstruksi, (6) Perdagangan, Hotel dan Restoran, (7) Pengangkutan dan Komunikasi, (8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, (9) Jasa-jasa. Masing-masing sektor ekonomi itu sendiri terdiri dari sub-sub sektor ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Pemecahan perekonomian menjadi sektor-sektor dan sub-sub sektor ini dimaksudkan untuk mengetahui struktur ekonomi dan bekerjanya perekonomian serta hubungan antara bagian-bagiannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda atau dihitung dua kali (*double accounting*).
2. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*), yaitu bahwa PDRB merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh para pemilik faktor-faktor produksi selama satu tahun. Pendapatan tersebut meliputi: sewa, bunga modal, upah/gaji dan laba usaha (surplus usaha).
3. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*), artinya bahwa besarnya PDRB merupakan jumlah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga sosial swasta yang tidak mencari keuntungan, konsumsi pemerintah, pembentukan

modal tetap domestik bruto, perubahan stock, dan ekspor netto (ekspor dikurangi impor) didalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

### **Teori Pusat Pertumbuhan**

Menurut Perraoux (Glasson, 1990:153) pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak. Pertumbuhan itu terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan dengan intensitas yang berubah-ubah serta perkembangan itu menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam dan dengan efek yang beraneka ragam terhadap keseluruhan perekonomian.

Gunnar Myrdall (Nuryasman, 1996:243) mengemukakan bahwa tempat-tempat yang menarik adalah tempat-tempat yang memiliki dan membina kondisi-kondisi alamiah yang sangat baik bagi pemusatan kegiatan perekonomian, sehingga daerah ini memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan daerah lainnya.

Syafrizal (Nuryasman, 1996:243) mengemukakan bahwa pendapat Hirschman tentang pusat pertumbuhan hampir sama dengan Perraoux yaitu kemajuan ekonomi tidak terjadi pada saat yang bersamaan di berbagai daerah. Pembangunan akan terjadi apabila terdapat daya tank yang kuat yang akan menciptakan konsentrasi ekonomi sekitar daerah di mana pertumbuhan terjadi. Hoover mengemukakan bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi akan terjadi pada suatu tempat apabila di tempat tersebut terdapat keuntungan lokasi yang terdiri atas *localization economies* dan *urbanization economies*.

Pada prinsipnya pertumbuhan hanya terjadi pada daerah yang mempunyai keunggulan komparatif, baik dari segi sumber daya alam, modal dan manusia. Adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah mengakibatkan tingkat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang berbeda (Richardson, 1991:80).

Boudeville (dalam Glasson, 1990:170) menyatakan secara spesifik kutub pertumbuhan sebagai sekelompok industri yang mengalami ekspansi dan

berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan perekonomian lebih lanjut ke daerah sekitarnya atau *hinterlandnya*. Jadi pada dasarnya teori kutub pertumbuhan menerangkan akibat dari sebagian wilayah yang memimpin yang akan menimbulkan proses polarisasi dimana kutub pertumbuhan akan mendorong pertumbuhan daerah sekitarnya dengan syarat prasarana yang sudah berkembang, penyediaan pelayanan sentral secara pengaruh, dan persebaran kesadaran akan dinamisme keseluruhan daerah pengaruh. Semua ini sangat penting bagi polarisasi. Polarisasi disini dimaksudkan sebagai proses perkembangan suatu wilayah *hinterland* yang disebabkan karena perkembangan wilayah yang dianggap sebagai pusat perkembangan wilayah tersebut (Richardson, 1991:85).

Daerah belakang merupakan daerah terpengaruh dan akan menerima jasa-jasa pelayanan baik sosial maupun ekonomi dari pusat pertumbuhan, sehingga yang dilakukan dapat dikontrol dari pusat pertumbuhan. Kegiatan yang dilakukan akan sangat dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya interaksi antara daerah belakang dengan pusat pertumbuhan. Interaksi yang baik antara pusat pertumbuhan dengan *hinterlandnya* akan menyebabkan timbulnya sistem hirarki yang sangat bermanfaat bagi sarana administrasi yang efisien dalam alokasi sumber-sumber yang strategis (Richardson, 1991,74).

### **Konsep Kutub Pertumbuhan Dan Pusat Pengembangan**

Teori kutub (pusat) pertumbuhan yang menekankan pada dinamisme dan aglomerasi industri akan memungkinkan adanya kebijaksanaan yang bersifat simultan, misalnya pemilihan pusat-pusat yang dominan dan terdapat desentralisasi kegiatan ekonomi.

Konsep dasar teori pusat pertumbuhan (*the theory of growth pole*) adalah sebagai berikut : (1) Proses pembangunan akan menimbulkan industri pemimpin (*L'industri motrice*) yang merupakan industri penggerak utama pembangunan daerah. Keterkaitan antar industri yang erat menyebabkan perkembangan industri pemimpin akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan erat dengan industri pemimpin tersebut; (2) Pemusatan

industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian. Pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya; (3) Perekonomian merupakan gabungan sistem industri yang relatif aktif (industri pemimpin) dengan industri-industri yang relatif pasif, yaitu industri yang tergantung pada industri pemimpin atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju dan aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif (Arsyad, 1997:331).

Konsep *L'Industrie Motrice* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

(1) Merupakan industri yang relatif baru dan mempunyai tingkat teknologi yang maju sehingga mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah; (2) Permintaan produknya mempunyai elastisitas pendapatan yang tinggi dan biasanya dijual ke pasar nasional serta; (3) Mempunyai kaitan-kaitan antar sektor industri yang kuat dengan sektor lainnya. Kaitan ini dapat berbentuk pengaruh keterkaitan kedepan atau *forward linkages effects* dan pengaruh keterkaitan kebelakang atau *backward linkages effects* (Arsyad, 1997:95).

Perroux (Arsyad, 1997:332) menyatakan bahwa ditinjau dari aspek lokasinya, pembangunan ekonomi daerah tidak merata dan cenderung terjadi proses aglomerasi atau pemusatan pada pusat-pusat pertumbuhan yang pada gilirannya pusat-pusat pertumbuhan tersebut mempengaruhi daerah-daerah yang lambat perkembangannya. Aglomerasi tersebut mempunyai keuntungan-keuntungan, yaitu keuntungan skala ekonomis (usaha dalam jumlah besar) dan keuntungan penghematan biaya. Keuntungan skala ekonomis dibagi menjadi :

(1) Keuntungan internal perusahaan.

Keuntungan yang timbul karena adanya faktor-faktor produksi yang tidak dapat dibagi yang hanya dapat diperoleh dalam jumlah tertentu. Jika dipakai dalam jumlah yang lebih banyak menyebabkan biaya produksi per unit menjadi lebih rendah dibandingkan jika dipakai dalam jumlah yang lebih sedikit.

**(2) Keuntungan lokalisasi (*Localization economies*)**

Keuntungan ini berhubungan dengan sumber bahan baku atau fasilitas sumber. Artinya dengan menumpuknya industri maka setiap industri merupakan sumber bahan baku atau pasar bagi industri lain.

**(3) Keuntungan ekstern (keuntungan urbanisasi)**

Aglomerasi beberapa industri pada suatu daerah mengakibatkan banyak tenaga kerja yang tersedia dan disamping itu aglomerasi juga mendorong didirikannya perusahaan jasa pelayanan masyarakat yang diperlukan industri oleh industri.

Aglomerasi juga mempunyai keuntungan penghematan biaya, yaitu menurunnya biaya transportasi. Penumpukan industri pada suatu daerah akan mendorong didirikannya perusahaan jasa angkutan dengan segala fasilitasnya. Suatu daerah pada umumnya dan suatu kota pada khususnya berkembang karena aglomerasi. Aglomerasi menyebabkan perusahaan-perusahaan dapat melakukan produksi dengan biaya rata-rata yang lebih rendah yang disebut *agglomeration economies* atau penghematan aglomerasi (Soepono, 1999:15).

**Teori Wilayah dan Kesenjangan Wilayah****1. Konsep Ruang Dan Pengembangan Wilayah**

Friedman dan Ciyde Weaver (1979:256) mengatakan bahwa wilayah merupakan proses memformulasikan tujuan-tujuan sosial dan pengaturan ruang untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut ruang merupakan dasar penting bagi perencana wilayah untuk membuat rencana sektoral dan program-program pembangunan wilayah serta pencanaan lokasi kegiatan tertentu.

Konsep ruang mempunyai beberapa elemen atau unsur yang dapat dilihat secara terpisah, namun bila dilihat secara bersamaan akan dapat dipergunakan dalam ruang lingkup yang lebih luas yaitu tata ruang kegiatan manusia. Unsur-unsur tata ruang yang penting antara lain : (1) Jarak; (2) Lokasi; (3) Bentuk dan; (4) Ukuran atau Skala. Unsur-unsur tersebut secara bersama-sama menyusun unit tata ruang yang disebut wilayah.

Konsep pengembangan wilayah nasional Indonesia mempunyai tujuan-tujuan : (1) Mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya; (2) Memperkokoh kesatuan ekonomi nasional dan; (3) Memelihara efisiensi pertumbuhan nasional. Ketiga tujuan tersebut saling berkaitan dan berkelakuan searah. Konsep pengembangan wilayah memerlukan keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya. Tingkat pertumbuhan yang tinggi serta merata mendorong suatu daerah untuk memperkokoh kesatuan ekonomi nasional yang secara tidak langsung akan terpelihara pula pertumbuhan nasional yang efisien (Hadjisaroso, 1990:2).

Keseimbangan antar daerah dapat memenuhi tuntutan keadilan sosial dan memungkinkan berlangsungnya perdagangan antar daerah yang berimbang. Perdagangan antar daerah yang berimbang adalah perdagangan efisien yang mendorong semakin intensifnya perdagangan antar daerah, sehingga dapat merangsang timbulnya spesialisasi daerah yang berarti membuka kesempatan yang lebih besar bagi masing-masing daerah untuk berkembang (Hadjisaroso, 1990:1)

Perdagangan yang berpijak pada spesialisasi daerah merupakan dasar bagi pertumbuhan nasional yang efisien. Dengan demikian usaha untuk memelihara pertumbuhan nasional yang efisien jelas sejalan dengan terwujudnya keseimbangan antar daerah (Hadjisaroso, 1990:2).

Realisasi dari kebijaksanaan pembangunan tersebut dibentuklah wilayah-wilayah pembangunan (SWP) yang dikelompokkan berdasarkan perbatasan daerah, dengan memperhatikan pengaruh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Pembentukan SWP berusaha untuk mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hal pertumbuhannya dengan efektif dan efisien. Tingkat pertumbuhan daerah diukur melalui tingkat perkembangan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yang menguasai daerah bersangkutan. Keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya pada prinsipnya dicapai dengan jalan membuat seimbang SSWP-SSWP yang terbentuk pada satu wilayah tertentu secara lebih baik dan efisien (Hadjisaroso, 1990:2).

## 2. Kesenjangan Antar Daerah

Pembangunan yang selama ini telah menghasilkan pertumbuhan yang cukup tinggi, ternyata belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat atau berbagai golongan penduduk seluruh daerah, dengan kata lain pertumbuhan yang tinggi belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan ketimpangan (kesenjangan) antar daerah. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah, perbedaan struktur ekonomi, infrastruktur (sarana dan prasarana) yang berbeda, aglomerasi serta kurangnya keterkaitan antar daerah, menimbulkan perbedaan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang akan menyebabkan kecenderungan terjadinya kesenjangan antar daerah dan antar sektor ekonomi suatu daerah. Bertitik tolak dari kenyataan ini, Ardani (1992:3) mengemukakan bahwa kesenjangan (ketimpangan) antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

Williamson (1965) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. (lihat Brojonegoro, 1999 :3).

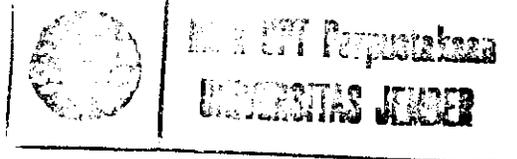
Menurut Williamson (1965:5-9), kesenjangan / ketimpangan antar daerah yang semakin membesar disebabkan oleh, pertama adanya migrasi tenaga kerja antar daerah bersifat selektif dan pada umumnya para migran tersebut lebih terdidik, mempunyai keterampilan yang tinggi, dan masih produktif. Kedua adanya migrasi kapital antar daerah, adanya proses aglomerasi pada daerah yang relatif kaya menyebabkan daya tarik tersendiri bagi investor pada daerah lain yang berakibat terjadinya aliran kapital ke daerah yang memang telah terlebih dahulu maju. Ketiga, adanya pembangunan sarana publik pada daerah yang lebih padat dari potensial berakibat mendorong terjadinya kesenjangan / ketimpangan antar daerah lebih besar. Keempat, kurangnya keterkaitan antar

daerah yang dapat menyebabkan terhambatnya proses efek sebar dari proses pembangunan yang berdampak pada semakin besarnya kesenjangan / ketimpangan yang terjadi.

Berdasarkan landasan teori sebelumnya dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari pertumbuhan daerah lain. Pertumbuhan tidak terjadi disembarang tempat, tetapi pertumbuhan hanya terjadi pada daerah yang mempunyai keunggulan komparatif, baik dari segi sumber daya alam, modal, dan manusia. Adanya perbedaan potensi dan PDRB yang dimiliki oleh masing-masing daerah mengakibatkan tingkat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi yang berbeda.

Menurut Myrdal (1957) perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, sehingga mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah (lihat Arsyad, 1999:129).

Esmara dalam studinya yang berjudul "Regional Income Disparity In Indonesia", membandingkan tingkat kemakmuran pada tiap-tiap daerah propinsi dengan menghitung pendapatan regional perkapita, dimana ia melihat terdapatnya disparitas pendapatan karena faktor kepadatan penduduk dan faktor kegiatan ekonomi serta tersedianya sumber-sumber alam di suatu daerah. Disparitas pendapatan antar daerah pada berbagai sektor dapat dilihat dengan membandingkan angka-angka PDRB yang berasal dari suatu daerah dengan daerah lain. Pendekatan yang dipakai dalam hal ini yaitu pendekatan yang membandingkan faktor *income* pada masing-masing daerah dan masing-masing sektor ekonomi (Arif, 1978:51).



### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Rancangan Penelitian

##### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan yaitu diskripsi. Penelitian diskripsi merupakan jenis penelitian yang berupaya menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena dengan merinci indikator-indikator yang mendukung fenomena tersebut tanpa mencari ada tidaknya hubungan antar indikator.

##### Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi per sektoral yang terjadi pada masing-masing daerah di wilayah GERBANGKERTASUSILA (SWP I) selama kurun waktu 1996-2000.

##### Daerah Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SWP I (GERBANGKERTASUSILA) propinsi Jawa Timur pada kurun waktu 1996-2000 yang meliputi : kabupaten Sidoarjo, kabupaten Mojokerto, kabupaten Lamongan, kabupaten Gresik, kabupaten Bangkalan, kota Mojokerto, dan kota Surabaya. Daerah penelitian yang dipilih pada SWP I selama kurun waktu tersebut dengan pertimbangan :

1. Dari tahun ke tahun kawasan SWP I merupakan yang terbesar kontribusinya dalam menyumbang besaran PDRB Jawa Timur dibandingkan SWP-SWP lainnya pada propinsi yang sama.
2. Kondisi geografis kawasan SWP I propinsi Jawa Timur yang cenderung heterogen.
3. Kawasan SWP I merupakan kawasan yang padat industri dan perdagangan.
4. Kawasan SWP I mempunyai perencanaan pembangunan yang berdasarkan teori kutub pertumbuhan.
5. Selama kurun waktu tersebut ada krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan Agustus 1997 dengan puncaknya yang terjadi pada tahun 1998.

### 3.2 Populasi

Populasi dalam penelitian ini diambil dari seluruh aktivitas sektor ekonomi wilayah pada SWP I (GERBANGKERTASUSILA) secara time series selama kurun waktu 1996-2000 dikarenakan pada periode tersebut merupakan tahun sebelum krisis, awal krisis, dan tahun sesudah atau paska krisis.

### 3.3 Prosedur Pengumpulan Data

#### Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi (BAPEPROP) Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Timur serta lembaga, instansi, dan badan atau kantor yang terkait.

#### Data Yang Dibutuhkan

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah penduduk masing-masing daerah di SWP I (GERBANGKERTASUSILA) pada kurun waktu 1996-2000.
2. Pendapatan (PDRB) masing-masing daerah di SWP I (GERBANGKERTASUSILA) pada kurun waktu 1996-2000.
3. Pendapatan perkapita di masing-masing daerah pada SWP I (GERBANGKERTASUSILA) selama kurun waktu 1996-2000
4. Data-data Pendukung yang berhubungan dengan kondisi sosial seperti : Keadaan geografis (luas wilayah), jenjang pendidikan formal penduduk, dan sumber mata pencaharian penduduk SWP I.

### 3.4 Metode Analisis Data

#### Analisis Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah di kawasan SWP I (GERBANGKERTASUSILA) propinsi Jawa Timur selama kurun waktu 1996-2000, dipergunakan metode diskriptif kuantitatif dan tabel perhitungan dengan formula (Hera, 1999:23) :

$$G_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

$G_t$  = Pertumbuhan ekonomi tahun t

$PDRB_t$  = Produk Domestik Regional Bruto tahun observasi (t)

$PDRB_{t-1}$  = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya (t-1)

#### Analisis Indeks Williamson

Untuk mengetahui tingkat kesenjangan pendapatan di kawasan SWP I (GERBANGKERTASUSILA) propinsi Jawa Timur selama kurun waktu 1996-2000, dipergunakan metode Indeks Williamson dengan formula (Tambunan, 2001:183) :

$$I_w = \frac{\sqrt{\sum_i (Y_i - Y)^2 \cdot \frac{P_i}{P}}}{Y}$$

Dimana :

$I_w$  = Indeks Williamson

$Y_i$  = Pendapatan daerah i

$Y$  = Pendapatan rata-rata SWP I (GERBANGKERTASUSILA)

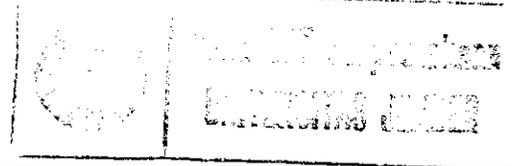
$P_i$  = Jumlah penduduk daerah i

$P$  = Jumlah penduduk SWP I (GERBANGKERTASUSILA)

Apabila nilai indeks Williamson besar, maka kesenjangan pendapatan juga besar dan apabila nilai indeks Williamson kecil, maka kesenjangan pendapatan juga kecil. Untuk mengetahui daerah manakah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan, dilakukan dengan cara menghilangkan beberapa daerah dari perhitungan, dimana daerah-daerah tersebut dipandang sebagai penyebab terjadinya kesenjangan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jika Kesenjangan pendapatan semakin kecil setelah beberapa daerah tersebut dikeluarkan dari perhitungan, berarti daerah-daerah tersebut merupakan penyebab adanya kesenjangan, dan apabila sebaliknya, daerah-daerah tersebut bukan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan.

### 3.5 Definisi Variabel Operasional

1. PDRB yaitu produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam suatu negara serta barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang-orang atau perusahaan asing yang ada dalam wilayah tersebut selama satu tahun berdasarkan harga konstan 1993. Dalam hal ini dipakai metode pendekatan produksi per tahun.
2. Pertumbuhan ekonomi yaitu perubahan PDRB dari tahun ke tahun
3. Jumlah penduduk yaitu banyaknya penduduk pada masing-masing daerah selama satu tahun menurut registrasi BPS Propinsi Jawa yang diukur dalam satuan jiwa.
4. Pertumbuhan penduduk yaitu perubahan jumlah penduduk dari tahun ke-tahun.
5. Pendapatan rata-rata SWP I yaitu PDRB rata-rata SWP I selama kurun waktu 1996-2000.
6. Penduduk daerah  $i$  yaitu jumlah penduduk akhir tahun pada sub wilayah di SWP I.
7. Penduduk SWP I yaitu seluruh penduduk di sub-sub wilayah SWP I pada akhir tahun.



IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah

Keadaan Geografis

Berdasarkan struktur pembagian Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) propinsi Jawa Timur, Surabaya dan sekitarnya dikelompokkan dalam Satuan Wilayah Pembangunan I (SWP I) yang terdiri atas 5 kabupaten dan 2 kotamadya. Wilayah SWP I biasa dikenal dengan nama GERBANGKERTASUSILA yang meliputi : Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kotamadya Mojokerto, dan Kotamadya Surabaya. SWP I mempunyai luas wilayah sebesar 6.279,07 Km<sup>2</sup>. Dari jumlah luas wilayah tersebut, Kabupaten Lamongan merupakan daerah yang paling luas yaitu sebesar 1.812,50 Km<sup>2</sup>, Sedangkan Kabupaten Bangkalan 1.248,88 Km<sup>2</sup>, Kabupaten Gresik 1.191,25 Km<sup>2</sup>, Kabupaten Mojokerto 969,36 Km<sup>2</sup>, Kabupaten Sidoarjo 714,24 Km<sup>2</sup>, Kota Surabaya 326,37 Km<sup>2</sup>, dan Kota Mojokerto 16,47 Km<sup>2</sup>. Untuk lebih jelasnya, luas daerah masing-masing kabupaten/kota di SWP I dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Luas Wilayah Masing-Masing Kabupaten / Kota di SWP I (GERBANGKERTASUSILA) Menurut Struktur Penggunaan Lahan Tahun 2000 (%).

No	Jenis penggunaannya	Luas Wilayah						
		Kabupaten					Kota	
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemukiman	25,80	13,63	8,31	10,21	10,30	51,61	55,50
2.	Persawahaan	38,05	51,38	46,59	33,19	23,15	41,04	22,77
3.	Tegal	0,74	9,46	16,13	23,98	56,00	4,55	-----
4.	Perkebunan	-----	0,38	0,26	1,23	-----	-----	-----
5.	Kebun Campur	-----	-----	0,12	0,07	0,77	-----	-----
6.	Hutan	1,45	24,80	17,78	3,20	4,58	-----	3,40
7.	Rawa/Danau/ Waduk	0,74	0,03	1,02	0,01	1,17	-----	-----
8.	Tambak/Kolam	21,93	0,05	2,87	18,75	2,91	-----	16,07
9.	Tanah tandus/ Tambang	-----	0,10	0,23	0,10	0,76	-----	-----
10.	Padang rumput/ Tanah kosong	1,44	0,13	-----	-----	-----	-----	2,25
11.	Lain-lain	9,84	0,05	6,70	9,27	0,35	2,79	-----
	Jumlah <sup>a)</sup>	714,24	969,36	1812,50	1191,25	1248,88	16,47	326,37

Keterangan : 1: Kabupaten Sidoarjo, 2: Kabupaten Mojokerto, 3: Kabupaten Lamongan, 4: Kabupaten Gresik, 5: Kabupaten Bangkalan, 6: Kota Mojokerto, 7: Kota Surabaya.

<sup>a)</sup> Dalam satuan Km<sup>2</sup>

Sumber : Lampiran 1

## Keadaan Sosial Budaya

### 1. Keadaan Penduduk

Menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2000 jumlah penduduk SWP I pada tahun 2000 yaitu 7.619.849 jiwa. Jumlah penduduk sebesar ini terbagi atas 3.745.156 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 3.874.693 jiwa berjenis kelamin perempuan. Kepadatan penduduk SWP I pada tahun 2000 yaitu sebesar 1214 jiwa setiap 1 km<sup>2</sup>. Diantara 7 Kabupaten/Kota di SWP I, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk yang paling besar yaitu 32,09 % yang diikuti oleh Kabupaten Sidoarjo sebesar 16,62 % dan Kabupaten Lamongan sebesar 15,75 %. Untuk kepadatan penduduk yang paling tinggi di SWP I, Kota Surabaya sebagai kota yang paling padat penduduknya yaitu sebesar 7491 Jiwa setiap 1 km<sup>2</sup> yang diikuti oleh Kota Mojokerto sebesar 6560 Jiwa setiap 1 km<sup>2</sup> dan Kabupaten Sidoarjo sebesar 1774 Jiwa setiap 1 km<sup>2</sup>. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.

**Tabel 3. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk di SWP I (GERBANGKERTASUSILA) Jawa Timur Tahun 2000 (%).**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk <sup>*)</sup>
1.	Kabupaten Sidoarjo	16,62	11,37	1774
2.	Kabupaten Mojokerto	11,56	15,44	909
3.	Kabupaten Lamongan	15,75	28,87	662
4.	Kabupaten Gresik	12,55	18,97	803
5.	Kabupaten Bangkalan	10,00	19,89	610
6.	Kota Mojokerto	01,42	00,26	6560
7.	Kota Surabaya	32,09	05,20	7491
	<b>SWP I</b>	<b>(7.619.849)*</b>	<b>(6279,07)**</b>	<b>1214</b>

**Keterangan :** \* Dalam satuan jiwa

\*\* Dalam Km<sup>2</sup>

\*) Dalam satuan jiwa setiap 1 Km<sup>2</sup>

**Sumber :** Lampiran 1, 2, dan 3

**Tabel 4. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Pada Tiap-tiap Kabupaten / Kota di SWP I Jawa Timur selama kurun waktu 1996-2000 (%).**

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Penduduk				
		1996	1997	1998	1999	2000
1.	Kabupaten Sidoarjo	1,80	1,95	2,36	3,39	2,78
2.	Kabupaten Mojokerto	1,72	1,34	0,86	1,70	3,39
3.	Kabupaten Lamongan	0,65	0,39	0,29	0,40	0,54
4.	Kabupaten Gresik	3,13	1,01	0,10	2,44	1,50
5.	Kabupaten Bangkalan	0,57	0,89	0,23	2,10	1,71
6.	Kota Mojokerto	1,19	0,70	0,93	0,84	0,02
7.	Kota Surabaya	0,64	0,51	0,70	1,18	1,83
	Rata-rata	1,39	0,97	0,78	1,24	1,68

*Sumber* : Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penduduk yang paling tinggi di SWP I terjadi pada tahun 2000 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,68 %. Pertumbuhan penduduk terendah selama kurun waktu 1996-2000 di SWP I terjadi pada tahun 1998 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,78 %.

## 2. Keadaan Pendidikan

Program pendidikan yang dikembangkan di SWP I (GERBANGKERTASUSILA ) propinsi Jawa Timur yaitu program pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan non formal mendapat perhatian yang cukup besar dalam menunjang peningkatan pendidikan masyarakat. Kegiatan pendidikan non formal sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menunjang kegiatan pendidikan formal. Salah satu ukuran kemajuan suatu daerah yaitu semakin banyaknya sumber daya manusia yang handal dan ahli pada suatu daerah tersebut. Ukuran tersebut bisa dilihat dari banyaknya sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi pada suatu daerah yang bersangkutan. Semakin banyak sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi pada suatu daerah maka daerah tersebut akan mempunyai keunggulan komparatif dalam hal SDM. Dengan mempunyai banyak SDM yang handal dan ahli, maka tingkat produktifitas kerja pada suatu daerah akan meningkat.

Meningkatnya produktifitas ini akan meningkatkan pula kegiatan ekonomi pada daerah yang bersangkutan, sehingga mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

**Tabel 5. Persentase Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas di SWP I (GERBANGKERTASUSILA) Propinsi Jawa Timur Tahun 2000.**

No	Pendidikan Tertinggi	Persentase (%)
1.	Tidak/belum pernah sekolah	11,20
2.	Tidak/belum tamat SD/MI	18,34
3.	SD/MI	28,87
4.	SLTP/Sederajad	17,70
5.	SMU/Sederajad	14,19
6.	Diploma	05,43
7.	Perguruan Tinggi (S1)	04,27
	Jumlah	100,00

*Sumber* : Hasil Susenas Tahun 2001

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa persentase penduduk yang belum pernah sekolah dan belum tamat SD/MI masih mendominasi di SWP I. Jumlah penduduk yang tamat SD/MI di SWP I merupakan Jumlah penduduk yang menyumbang persentase terbesar pada wilayah tersebut. Artinya sebagian besar penduduk SWP I berpendidikan tertinggi SD/MI. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditawarkan semakin kecil persentase penduduk SWP I yang mengikuti dan menamatkannya.

### **Keadaan Sosial Ekonomi**

Sumber mata pencaharian penduduk yang utama di SWP I yaitu dari hasil pertanian, perdagangan dan industri. Keadaan mata pencaharian penduduk di SWP I dapat dilihat pada tabel 6. Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa Lapangan usaha yang mendominasi di SWP I adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor industri. Domonasi pada sektor pertanian ini diakibatkan oleh daerah-daerah yang kurang maju seperti

Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Mojokerto. Sedangkan dominasi pada sektor industri dan perdagangan diakibatkan oleh daerah-daerah maju pada wilayah tersebut, seperti Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi terjadi pada daerah-daerah yang banyak ditopang oleh sektor sekunder, sedangkan untuk daerah-daerah yang sektor ekonominya lebih besar ditopang oleh sektor primer pertumbuhan ekonominya relatif rendah.

**Tabel 6. Peranan Sektoral Dan Sumber Mata Pencaharian Penduduk Menurut Lapangan Usaha Utama Di SWP I Tahun 2000 (%).**

No	Lapangan Usaha	Peran Sektoral	Mata Pencaharian
1.	Pertanian	18,78	31,25
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,88	0,30
3.	Industri Pengolahan	21,79	19,89
4.	Listrik, Gas, dan Air	5,84	0,27
5.	Konstruksi	4,88	3,62
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	21,59	21,59
7.	Komunikasi dan Pengangkutan	8,83	6,45
8.	Keuangan	1,24	2,15
9.	Jasa-jasa	12,90	14,45
10.	Lain-lain	2,27	0,03
	Jumlah Total	100,00	100,00

**Sumber:** Lampiran 4 dan 5

## Kondisi Ekonomi

### 1. Komposisi PDRB Kabupaten / Kota Di SWP I

Dengan memperhatikan tabel 7 dapat diketahui bahwa secara mutlak komposisi PDRB masing-masing kabupaten / kotamadya di SWP I dari tahun ketahun relatif stabil. Sumbangan PDRB terbesar didominasi oleh tiga daerah yaitu Kotamadya Surabaya sebagai dominasi pertama, Kabupaten Sidoarjo sebagai dominasi kedua, dan Kabupaten Gresik sebagai dominasi ketiga. Adanya perbedaan PDRB yang mencolok pada tabel 7 menunjukkan adanya tingkat kesenjangan pendapatan yang tinggi di SWP I. Komposisi PDRB dari masing-masing kabupaten / kotamadya yang relatif stabil dari tahun ketahun di

SWP I (GERBANGKERTASUSILA) akan memperpanjang dan memperlama tingkat kesenjangan pendapatan yang terjadi pada wilayah tersebut.

**Tabel 7. Komposisi PDRB Masing-Masing Kabupaten / Kotamadya Di SWP I Atas Dasar Harga Konstan 1993, Periode 1996-2000 (%).**

No	Kabupaten / Kotamadya	Tahun				
		1996	1997	1998	1999	2000
1.	Kab. Sidoarjo	20,35	20,36	20,32	20,36	20,39
2.	Kab. Mojokerto	4,49	4,37	4,67	4,79	4,72
3.	Kab. Lamongan	3,59	3,49	3,97	4,02	3,99
4.	Kab. Gresik	13,33	13,24	13,47	13,85	14,14
5.	Kab. Bangkalan	2,54	2,46	2,82	2,80	2,75
6.	Kota Mojokerto	1,18	1,15	1,27	1,28	1,28
7.	Kota Surabaya	54,52	54,92	53,48	52,90	52,73
	SWP I	100	100	100	100	100

*Sumber* : Lampiran 6

## 2. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dari pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah / daerah tertentu. PDRB perkapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran suatu wilayah atau daerah. PDRB perkapita SWP I pada tahun 1996-1997 mengalami kenaikan, sedangkan untuk tahun 1998-1999 mengalami penurunan, dan pada tahun 2000 mengalami kenaikan kembali. Hal ini disebabkan adanya resesi ekonomi pada tahun 1998 yang mengakibatkan rendahnya kegiatan ekonomi wilayah.

Naiknya PDRB perkapita pada tahun 2000 disebabkan oleh berbagai upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk daerah-daerah di SWP I yang PDRB perkapitanya tinggi dan melebihi PDRB perkapita SWP I propinsi Jawa Timur adalah daerah kota dan daerah-daerah yang rata-rata peranan sektor industri dan perdagangannya tinggi seperti Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kotamadya Mojokerto untuk tahun 1998-2000, dan Kotamadya Surabaya.

## 4.2 Analisis Data

### Analisis Pertumbuhan Ekonomi

Cepat dan lambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pergeseran dan perubahan pendapatan yang diterima oleh masing-masing daerah yang bersangkutan. Semakin cepat tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan berakibat pada semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh daerah yang bersangkutan dan sebaliknya, semakin lambat tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan berakibat pada semakin kecil pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut. Hasil analisis pertumbuhan ekonomi pada masing-masing kabupaten / kota dapat dilihat pada tabel 8.

**Tabel 8. Pertumbuhan Ekonomi Masing-Masing Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan 1993 Di SWP I (GERBANGKERTASUSILA) Jawa Timur Tahun 1996-2000 (%).**

No	Tahun	Kabupaten / Kotamadya							SWP I
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	1996	7,86	5,75	4,36	10,92	5,30	9,86	10,34	9,33
2.	1997	5,67	2,69	2,90	4,87	2,54	3,54	6,41	5,63
3.	1998	-20,46	-14,80	-9,33	-18,88	-8,75	-12,52	-22,38	-20,29
4.	1999	1,06	3,58	2,06	3,71	0,07	1,97	-0,25	0,86
5.	2000	3,92	2,25	2,86	5,92	1,89	3,67	3,42	3,75
	Rata-rata	-0,39	-0,11	0,57	1,31	0,21	1,30	-0,49	-0,14

**Keterangan :** 1: Kabupaten Sidoarjo, 2: Kabupaten Mojokerto, 3: Kabupaten Lamongan, 4: Kabupaten Gresik, 5: Kabupaten Bangkalan, 6: Kotamadya Mojokerto, 7: Kotamadya Surabaya.

**Sumber :** Lampiran 6

Dari hasil analisa diatas dapat diketahui bahwa lokasi-lokasi pertumbuhan terdapat pada daerah-daerah seperti Kabupaten Gresik dan Kotamadya Mojokerto dengan angka pertumbuhan rata-rata pertahun selama periode 1996-2000 diatas 1. Hal ini disebabkan pada kedua daerah tersebut mempunyai keunggulan komparatif maupun kompetitif dalam menunjang perekonomiannya. Daerah-daerah yang mempunyai rata-rata pertumbuhan positif selama kurun waktu 1996-2000 dikarenakan pada daerah tersebut industri menengah besar

tidak menjadi dominan dalam menciptakan nilai tambah. Nilai tambah lebih dominan pada sektor primer, perdagangan dan jasa, sehingga beban industri yang cukup besar akibat krisis relatif tidak berpengaruh terhadap roda perekonomian.

**Tabel 9. Pertumbuhan Ekonomi Pada Pusat-Pusat Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 1993 Di SWP I (GERBANGKERTASUSILA) Jawa Timur Tahun 1996-2000 (%).**

No	Tahun	Kabupaten / Kotamadya			Pusat Pertumbuhan
		1	2	3	
1.	1996	7,86	10,92	10,34	9,84
2.	1997	5,67	4,87	6,41	6,01
3.	1998	-20,46	-18,88	-22,38	-21,41
4.	1999	1,06	3,71	-0,25	0,67
5.	2000	3,92	5,92	3,42	3,94
	Rata-rata	-0,39	1,31	-0,49	-0,19

**Keterangan :** 1: Kabupaten Sidoarjo, 2: Kabupaten Gresik, 3: Kotamadya Surabaya.

**Sumber :** Tabel 8 dan Lampiran 6

Berdasarkan tabel 9 diatas menunjukkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan di SWP I pada periode 1996-2000 mempunyai rata-rata lebih kecil jika dibandingkan dengan SWP I secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan adanya krisis ekonomi pada tahun 1998 yang lebih banyak berpengaruh pada pusat-pusat pertumbuhan, dimana sektor industri lebih dominan dalam menopang pertumbuhannya. Pengaruh ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 yaitu pada pusat-pusat pertumbuhan sebesar -21,41 persen lebih kecil jika dibandingkan dengan SWP I secara keseluruhan yaitu sebesar -20,29 persen.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada tabel 10 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan wilayah *hinterland* pada periode 1996-2000 lebih tinggi jika dibandingkan dengan pusat-pusat pertumbuhan maupun wilayah SWP I secara keseluruhan. Hal ini disebabkan pada wilayah *hinterland* tersebut industri menengah besar kurang dominan dalam menciptakan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonominya, sehingga beban industri yang cukup besar akibat

adanya krisis ekonomi relatif kurang berpengaruh terhadap roda perekonomian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini.

**Tabel 10. Pertumbuhan Ekonomi Pada Wilayah *Hinterland* Atas Dasar Harga Konstan 1993 Di SWP I (GERBANGKERTASUSILA) Jawa Timur Tahun 1996-2000 (%).**

No	Tahun	Kabupaten / Kotamadya				<i>Hinterland</i>
		1	2	3	4	
1.	1996	5,75	4,36	5,30	9,86	5,62
2.	1997	2,69	2,90	2,54	3,54	2,80
3.	1998	-14,80	-9,33	-8,75	-12,52	-11,61
4.	1999	3,58	2,06	0,07	1,97	2,17
5.	2000	2,25	2,86	1,89	3,67	2,50
	Rata-rata	-0,11	0,57	0,21	1,30	0,30

**Keterangan :** 1: Kabupaten Mojokerto, 2: Kabupaten Lamongan, 3: Kabupaten Bangkalan, 4 : Kotamadya Mojokerto.

**Sumber :** Tabel 8 dan Lampiran 6

Pada periode 1996-2000 terdapat krisis ekonomi yang puncaknya terjadi pada tahun 1998. Krisis ekonomi yang terjadi lebih banyak menghancurkan sektor sekunder utamanya industri pengolahan dan konstruksi, sehingga kabupaten / kotamadya yang banyak ditopang oleh sektor sekunder akan lebih besar merasakan dampak dari krisis ekonomi tersebut dibandingkan kabupaten/ kotamadya yang pertumbuhannya ditopang oleh sektor primer dan tersier.

### **Analisis Indeks Williamson**

Analisis Indeks Williamson ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan pendapatan di SWP I (GERBANGKERTASUSILA) propinsi Jawa Timur. Kesenjangan pendapatan tersebut dihitung dari Kabupaten dan Kotamadya yang menjadi bagian dari SWP I propinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson pada tabel 11 dapat diketahui bahwa SWP I mempunyai tingkat kesenjangan pendapatan yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai Indeks Williamson yang dihasilkan.

**Tabel 11. Hasil Indeks Williamson SWP I (GERBANGKERTASUSILA) Propinsi Jawa Timur Tahun 1996-2000.**

No	Tahun	Indeks Williamson
1.	1996	1,67
2.	1997	1,69
3.	1998	1,63
4.	1999	1,60
5.	2000	1,59
	Rata-rata	1,64

*Sumber* : Lampiran 8

Nilai Indeks Williamson yang dihasilkan pada tabel 11 menunjukkan nilai rata-rata pertahun yang sangat tinggi yaitu sebesar 1,64 pertahun. Menurut Tambunan, kesenjangan pendapatan tinggi apabila nilai Indeks Williamson mendekati 1 dan rendah apabila mendekati 0, sehingga angka tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan yang terjadi sangat tinggi. Oleh karena itu perlu dianalisis lebih lanjut dengan mengeluarkan beberapa daerah dari perhitungan. Daerah-daerah yang dikeluarkan dari perhitungan adalah daerah yang mengakibatkan tingginya kesenjangan pendapatan yang terjadi pada wilayah tersebut. Daerah yang dikeluarkan dari perhitungan adalah Kotamadya Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. Daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang mempunyai pendapatan / PDRB yang lebih tinggi diantara daerah-daerah lainnya di SWP I.

Pada tabel 12 menunjukkan bahwa setelah Kotamadya Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik dikeluarkan dari perhitungan ternyata angka Indeks Williamson SWP I menurun drastis, yaitu berkisar antara 0,30 sampai dengan 0,31 atau rata-rata 0,31 pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kesenjangan atau disparitas pendapatan di SWP I disebabkan oleh keberadaan Kotamadya Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik pada suatu wilayah pembangunan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 12.

**Tabel 12. Hasil Indeks Williamson SWP I (GERBANGKERTASUSILA) Propinsi Jawa Timur Tahun 1996-2000 (Tanpa Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik).**

No	Tahun	Indeks Williamson
1.	1996	0,31
2.	1997	0,31
3.	1998	0,30
4.	1999	0,31
5.	2000	0,31
	Rata-rata	0,31

**Sumber :** Lampiran 8

Untuk mengetahui seberapa jauh kesenjangan pendapatan yang diakibatkan oleh ketiga daerah tersebut, maka perlu dihitung pula kesenjangan pendapatan yang terjadi pada ketiga daerah tersebut yang merupakan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan SWP I propinsi Jawa Timur.

**Tabel 13. Hasil Indeks Williamson Pada Pusat-Pusat Pertumbuhan Di SWP I (GERBANGKERTASUSILA) Propinsi Jawa Timur Tahun 1996-2000.**

No	Tahun	Indeks Williamson
1.	1996	0,69
2.	1997	0,69
3.	1998	0,67
4.	1999	0,65
5.	2000	0,65
	Rata-rata	0,67

**Sumber :** Lampiran 8

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui bahwa Indeks Williamson di ketiga daerah tersebut (Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kotamadya Surabaya) menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan wilayah *hinterland*-nya yaitu berkisar antara 0,65 sampai dengan 0,69 atau rata-rata

0,67 pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan pada pusat-pusat pertumbuhan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kesenjangan pendapatan yang terjadi pada wilayah *hinterland*-nya yang sekaligus menunjukkan bahwa ketiga daerah tersebut sebagai penyebab terbesar terjadinya kesenjangan pendapatan di SWP I propinsi Jawa Timur. Tingginya kesenjangan pendapatan ini dikarenakan perbedaan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dalam hal pemanfaatannya dan pemberdayaannya, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

#### 4.3 Pembahasan

SWP I (GERBANGKERTASUSILA) propinsi Jawa Timur secara umum kurang berhasil dalam menerapkan kebijakan tata ruang perencanaan pembangunannya. Hal tersebut dijelaskan dalam hasil analisis yang telah diuraikan dalam sub bab analisis data. Hasil tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dengan tingkat kesenjangan pendapatan yang tinggi.

Hasil analisis pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan tidak terjadi pada saat yang bersamaan di berbagai daerah, tetapi pertumbuhan hanya terjadi pada daerah-daerah yang mempunyai keunggulan komparatif, baik dari segi sumber daya alam, modal dan manusia. Adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah akan mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan ekonomi yang berbeda antar daerah tersebut. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, sehingga mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun. Hal ini mengakibatkan ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi yang semakin tajam dan meningkatkan pula kesenjangan pendapatan antar daerah.

Pada tahun 1996-2000 pertumbuhan ekonomi SWP I dan masing-masing daerah baik pusat-pusat pertumbuhan maupun *hinterland* secara absolut untuk rata-rata pertumbuhannya mengalami turun naik. Rata-rata pertumbuhan tertinggi untuk masing-masing wilayah baik SWP I secara keseluruhan maupun pusat-pusat pertumbuhan dan *hinterland*-nya terjadi pada tahun 1996, sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 1998 yang merupakan tahun krisis ekonomi. Daerah *hinterland* mempunyai rata-rata pertumbuhan lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan pada pusat-pusat pertumbuhan maupun wilayah SWP I secara keseluruhan pada periode 1996-2000. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata pertumbuhan wilayah *hinterland* yang lebih besar yaitu 0,30 persen pertahun, sedangkan SWP I secara keseluruhan sebesar -0,14 persen pertahun dan pusat-pusat pertumbuhan sebesar -0,19 persen pertahun.

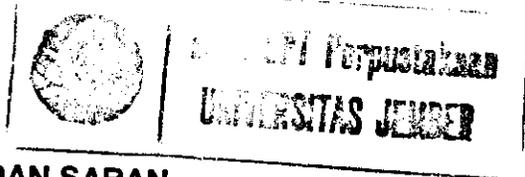
Tingginya pertumbuhan rata-rata wilayah *hinterland* pada periode 1996-2000 disebabkan oleh industri menengah besar dalam wilayah *hinterland* tersebut tidak dominan dalam menciptakan nilai tambah, sehingga krisis ekonomi yang banyak menghancurkan sektor industri kurang begitu menjadi beban terhadap roda perekonomian pada wilayah tersebut. Sebaliknya pada pusat-pusat pertumbuhan yang seharusnya mempunyai rata-rata pertumbuhan yang tinggi pertahun memiliki pertumbuhan rata-rata terendah pertahun selama periode 1996-2000. Hal ini sebagai akibat dari krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang puncaknya pada tahun 1998. Akibat dari krisis ekonomi tersebut banyak menghancurkan perekonomian pada pusat-pusat pertumbuhan, dimana sektor industri lebih dominan dalam menciptakan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian terdahulu, bahwa cepat dan lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah / wilayah dapat mengakibatkan disparitas atau kesenjangan pendapatan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Pada umumnya kesenjangan pendapatan antar daerah terjadi karena adanya satu atau beberapa daerah yang mendominasi dan adanya daerah yang tidak mendominasi pada suatu wilayah yang sama.

Dominasi yang di maksud disini yaitu tingkat pendapatan daerah. Beberapa daerah memang diharapkan mampu menarik perkembangan daerah lainnya, tetapi tingkat kesenjangan pendapatan yang tinggi belum juga dapat diatasi.

Berdasarkan hasil analisis Indeks Williamson pada poin 4.2.2, menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan yang terjadi di SWP I adalah sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dari nilai Indeks Williamson yang dihasilkan sebesar 1,59 sampai dengan 1,69. Nilai Indeks Williamson ini merupakan nilai yang sangat besar, sehingga perlu dianalisa lebih lanjut dengan mengeluarkan daerah-daerah yang mengakibatkan tingginya kesenjangan pendapatan yang terjadi pada wilayah tersebut. Daerah-daerah yang dikeluarkan dari perhitungan adalah daerah yang mempunyai pendapatan / PDRB yang lebih tinggi diantara daerah-daerah lainnya di SWP I seperti Kotamadya Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik.

Setelah Kotamadya Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik dikeluarkan dari perhitungan ternyata angka Indeks Williamson SWP I menurun drastis, yaitu sebesar 0,30 sampai dengan 0,31. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kesenjangan atau disparitas pendapatan di SWP I disebabkan oleh keberadaan Kotamadya Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik pada suatu wilayah pembangunan tersebut. Dari kenyataan lain membuktikan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan pada pusat-pusat pertumbuhan ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan kesenjangan pendapatan yang terjadi pada wilayah *hinterland* yaitu berkisar antara 0,65 sampai dengan 0,69. Dengan kenyataan yang demikian itu dapat di mengerti bahwa pertumbuhan yang pesat di suatu daerah yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan yang sama pada daerah lain akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendapatan antar daerah tersebut. Apabila kondisi seperti ini terus dibiarkan maka tingkat kesenjangan pendapatan antar daerah tersebut akan semakin tinggi. Hal ini merupakan suatu konsekuensi logis dari suatu pertumbuhan ekonomi yang pesat bagi daerah yang bersangkutan, sehingga daerah lain yang pertumbuhannya lamban akan menjadi korban.



## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai analisis kesenjangan pendapatan di wilayah SWP I GERBANGKERTASUSILA propinsi Jawa Timur menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Dalam kurun waktu tahun 1996-2000, pertumbuhan ekonomi SWP I propinsi Jawa Timur rata-rata -0,14 persen pertahun, pertumbuhan ekonomi wilayah pusat-pusat pertumbuhan rata-rata -0,19 persen pertahun, dan pertumbuhan wilayah *hinterland* rata-rata 0,30 persen pertahun. Untuk masing-masing Kabupaten / Kotamadya, pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun berturut-turut sebagai berikut : Kabupaten Sidoarjo -0,39 persen pertahun, Kabupaten Mojokerto -0,11 persen pertahun, Kabupaten Lamongan 0,57 persen pertahun, Kabupaten Gresik 1,31 persen pertahun, Kabupaten Bangkalan 0,21 persen pertahun, Kotamadya Mojokerto 1,30 persen pertahun, dan Kotamadya Surabaya -0,49 persen pertahun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada wilayah *hinterland* dan pada masing-masing Kabupaten / Kotamadya seperti Kabupaten Gresik dan Kotamadya Mojokerto, disebabkan pada wilayah atau daerah tersebut industri menengah besar tidak menjadi dominan dalam menciptakan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah atau daerah tersebut. Nilai tambah lebih dominan pada sektor primer, perdagangan dan jasa, sehingga beban industri yang cukup besar akibat krisis ekonomi relatif kurang berpengaruh terhadap roda perekonomian wilayah tersebut.
2. Angka Indeks Williamson dari hasil analisis tahun 1996-2000 di SWP I menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan di SWP I tergolong sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 1,59 sampai dengan 1,69. Indeks Williamson sebesar ini membuktikan bahwa perencanaan wilayah pada daerah ini belum bisa mengatasi kesenjangan pendapatan yang terjadi pada wilayah tersebut. Penyebab terjadinya kesenjangan pendapatan ini yaitu karena pendapatan Kotamadya

Surabaya, pendapatan Kabupaten Sidoarjo, dan pendapatan Kabupaten Gresik lebih mencolok dibandingkan kabupaten dan kotamadya lain di SWP I. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya ketiga daerah tersebut dari perhitungan ternyata Indeks Williamson menurun drastis yaitu sebesar 0,30 sampai dengan 0,31, sedangkan untuk ketiga daerah tersebut mempunyai Indeks Williamson yang lebih besar dibandingkan wilayah *hinterland*-nya yaitu sebesar 0,65 sampai dengan 0,69. Pembuktian ini menunjukkan bahwa ketiga daerah tersebut yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan di SWP I propinsi Jawa Timur selama periode 1996-2000 dan sekaligus membuktikan bahwa dengan tumbuhnya daerah-daerah industri mengakibatkan banyak daerah tidak dapat mengimbangi pertumbuhannya.

## 5.2 Saran

1. Hendaknya pembangunan lebih digiatkan pada daerah yang tergolong rendah pendapatannya agar daerah tersebut dapat meningkatkan pendapatannya sejajar dengan daerah-daerah lain yang lebih maju, sehingga dapat mengurangi perbedaan dalam tingkat perkembangan atau pembangunan dan kemakmuran antara daerah satu dengan daerah lain yang lebih maju, serta dalam jangka panjang perlu stabilitas untuk mengurangi gejolak perekonomian yang terjadi
2. Perlu diperhatikan tentang pola kebijaksanaan yang selama ini memusatkan kegiatan ekonomi disuatu daerah. Karena akan menjadikan daerah tersebut semakin eksklusif dan semakin jauh dari daerah-daerah lainnya, sehingga secara global keadaan semacam ini akan merugikan daerah lainnya.
3. Hendaknya pembangunan suatu daerah dikaitkan dengan pembangunan daerah lain melalui penyetaraan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah-daerah yang bersangkutan sehingga perkembangan ekonomi yang ada tidak menimbulkan dualistik ekonomi dimana tingkat kesenjangan pendapatan antar daerah sangat tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Sritua. A. 1978. *Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan Massal*, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta.
- Arsyad, Lincolin, 1997. *Ekonomi Pembangunan Edisi Ke-3*, STIE-YKPN, Yogyakarta.
- , 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, PT BPFE, Yogyakarta.
- Anonim, 1985. *Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur*, Kantor BPS Propinsi Jawa Timur.
- Boediono, 1985. *Ekonomi Makro*, FE-UGM, Yogyakarta.
- Badjuri, 1992. *Kesenjangan Pendapatan Antar Daerah Tingkat II Di Karesidenan Besuki Propinsi Jawa Timur*, Pusat Penelitian UNEJ, Jember.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia Tahun 1994-1998*, BPS, Jakarta, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik, *Jawa Timur Dalam Angka Tahun 1996-2000*, BPS, Surabaya, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik, *Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional*, BPS Propinsi Jawa Timur, Surabaya.
- Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi, *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Satuan Wilayah Pembangunan Se Jawa Timur Tahun 1996-2000*, BAPEPROP Jawa Timur, Surabaya.
- Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi, *Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Kota Se-Jawa Timur 2002*, BAPEPROP Jawa Timur, Surabaya
- Glasson, Jhon, 1990. *Pengantar Perencanaan Regional*, Alih Bahasa Paul Sihontang, LPFE-UI, Jakarta.
- Hadjisaroso, Poemomosi, 1990. *Konsep Dasar Pengembangan Wilayah Di Indonesia*, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Hartono, Imam. B, 1996. *Kesenjangan Pendapatan Antar Daerah Di Jawa Timur*, FE-UNEJ, Jember.

- Hera, dkk, 1999. *Indikator-Indikator Ekonomi Makro*, LPFE-UI, Jakarta.
- Nuryasman, 1996. *Pengembangan Konsep Pusat Pertumbuhan Terhadap Wilayah Kepulauan Indonesia*, Media Ekonomi Tri Sakti, Jakarta.
- Propenas, 2001. *UU No.25 Th.2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Partadireja, Ace, 1983. *Pengantar Ekonomika*, BPFE-UGM, LP3ES, Jakarta.
- Richardson, H.W, 1991. *Dasar-Dasar Ekonomi Regional*; Terjemahan Paul Sihontang, LPFE-UI, Jakarta.
- Syamsiyah, Sri. N, 1998. *Kesenjangan Pendapatan Di Wilayah Pembangunan Utama D (WPUD)*, FE-UNEJ, Jember.
- Soepono, Prasetyo, 1999. *Teori Lokasi : Representasi Landasan Mikro Bagi Teori Pembangunan Daerah*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, Vol 14 No.4, FE-UGM, Yogyakarta.
- Todaro, Michael P, 2000. *Ekonomi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.
- Tambunan, Tulus T.H, 2001. *Transformasi Ekonomi Di Indonesia : Teori dan Penemuan Empiris*, Salemba Empat, Jakarta.

Luas Wilayah Masing-Masing Kabupaten / Kota di SWP I (GERBANGKERTASUSILA) Jawa Timur Menurut Struktur Penggunaan Lahan Tahun 2000 (Km<sup>2</sup>).

Jenis penggunaannya	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )						
	Kabupaten					Kota	
	Sidoarjo	Mojokerto	Lamongan	Gresik	Bangkalan	Mojokerto	Surabaya
1. Pemukiman	184,30	132,13	150,58	121,63	128,58	8,50	181,15
2. Persawahaan	271,80	498,02	844,41	395,39	289,15	6,76	74,32
3. Tegall	5,28	91,66	292,36	285,70	699,36	0,75	-----
4. Perkebunan	-----	3,71	4,68	14,62	-----	-----	-----
5. KebunCampur	-----	-----	2,12	0,81	9,64	-----	-----
6. Hutan	10,38	240,36	322,29	38,15	57,22	-----	11,10
7. Rawa/Danau/ Waduk	5,29	0,25	18,50	0,02	14,65	-----	-----
8. Tambak/Kolam	156,61	0,49	52,11	223,36	36,36	-----	52,44
9. Tanah tandus/ Tambang	-----	0,93	4,25	1,15	9,55	-----	-----
10. Padang rumput/ Tanah kosong	10,28	1,28	-----	-----	-----	-----	7,36
11. Lain-lain	70,30	0,53	121,50	110,42	4,37	0,46	-----
Jumlah	714,24	969,36	1812,50	1191,25	1248,88	16,47	326,37

Sumber : Bappedrop Jawa Timur, tahun 2001

Jumlah Penduduk Akhir Tahun Menurut Kabupaten / Kotamadya Di SWP I (GERBANGKERTASUSILA)  
Propinsi Jawa Timur Tahun 1996-2000

Kabupaten / Kotamadya	Tahun				
	1996	1997	1998	1999	2000
1. Kab. Sidoarjo	1.142.413	1.164.646	1.192.165	1.232.552	1.266.776
2. Kab. Mojokerto	847.949	859.290	866.684	851.981	880.855
3. Kab. Lamongan	1.180.849	1.185.437	1.188.866	1.193.644	120.003
4. Kab. Gresik	910.365	919.515	920.478	942.898	957.048
5. Kab. Bangkalan	725.653	732.123	733.778	749.202	762.046
6. Kota. Mojokerto	105.401	106.135	107.123	108.027	108.045
7. Kota. Surabaya	2.344.520	2.356.486	2.373.082	2.401.104	2.444.976
<b>Total</b>	<b>7.257.150</b>	<b>7.323.632</b>	<b>7.382.176</b>	<b>7.479.408</b>	<b>7.619.849</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur, Tahun 1996-2001

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Di SWP I (GERBANGKERTASUSILA) Jawa Timur Tahun 2000.

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk/Jiwa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk Per Km <sup>2</sup>
1. Kabupaten Sidoarjo	1.266.776	714,24	1774
2. Kabupaten Mojokerto	880.855	969,36	909
3. Kabupaten Lamongan	1.200.103	1.812,50	662
4. Kabupaten Gresik	957.048	1.191,25	803
5. Kabupaten Bangkalan	762.046	1.248,88	610
6. Kota Mojokerto	108.045	16,47	6560
7. Kota Surabaya	2.444.976	326,37	7491
SWP I	7.619.849	6279,07	1214

Sumber : Bappeprop Jawa Timur, tahun 2001

Persentase Sumber Mata Pencarian Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Lapangan Usaha Utama  
Di SWP I (GERBANGKERTASUSILA) Jawa Timur Tahun 2000

Lapangan Usaha Utama	Kabupaten						Kotamadya		Rata-rata (%)
	Sidoarjo	Mojokerto	Lamongan	Gresik	Bangkalan	Mojokerto	Surabaya		
1. Pertanian	11,85	36,50	64,18	37,97	64,30	2,36	1,56	31,25	
2. Perambangan dan Galian	0,00	1,47	0,00	0,08	0,14	0,39	0,00	0,30	
3. Industri Pengolahan	35,73	22,26	7,40	24,38	4,87	23,89	20,71	19,89	
4. Listrik, Gas, dan Air	0,52	0,09	0,05	0,46	0,14	0,39	0,24	0,27	
5. Konstruksi	3,91	3,04	2,30	4,29	1,82	4,82	5,13	3,62	
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	20,81	17,79	16,19	18,52	13,55	32,55	31,75	21,59	
7. Komunikasi & Pengangkutan	5,93	5,68	3,06	4,46	4,13	8,95	12,99	6,45	
8. Keuangan	2,31	0,81	0,64	1,19	0,55	4,62	4,93	2,15	
9. Jasa	18,89	12,36	6,05	8,65	10,50	22,03	22,67	14,45	
10. Lain-lain	0,05	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
Jumlah / Total	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Hasil Susenas Tahun 2001

Persentase Peranan Sektorial (Nilai Tambah Bruto) Menurut Lapangan Usaha Utama  
Di SWP I (GERBANGKERTASUSILA) Jawa Timur Tahun 2000

Lapangan Usaha Utama	Kabupaten						Kota		Rata-rata (%)
	Sidoarjo	Mojokerto	Lamongan	Gresik	Bangkalan	Mojokerto	Surabaya		
1. Pertanian	4,67	18,93	50,88	10,11	44,69	1,92	0,26	18,78	
2. Pertambangan dan Galian	0,04	6,34	0,88	5,79	0,11	---	0,01	1,88	
3. Industri Pengolahan	45,89	18,24	0,59	48,33	0,61	7,30	31,56	21,79	
4. Listrik, Gas, dan Air	5,68	2,68	0,97	2,78	0,94	23,25	4,61	5,84	
5. Konstruksi	4,03	8,40	3,55	3,27	3,44	4,04	7,41	4,88	
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	23,48	21,99	14,75	16,13	21,21	26,14	27,42	21,59	
7. Komunikasi & Pangankutan	7,11	5,46	3,91	4,52	6,74	19,84	14,25	8,83	
8. Keuangan	0,27	0,69	1,25	0,77	1,07	2,12	2,49	1,24	
9. Jasa	7,72	14,30	19,49	7,45	16,92	13,97	10,44	12,90	
10. Lain-lain	1,13	2,97	3,75	0,86	4,25	1,39	1,54	2,27	
Jumlah / Total	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Bapeprop Jawa Timur Tahun 2001

PDRB Masing-Masing Kabupaten / Kotamadya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Di SWP I  
(GERBANGKERTASUSILA) Propinsi Jawa Timur Tahun 1996-2000 (Dalam Jutaan Rupiah)

Kabupaten / Kotamadya	Tahun					Rata-rata
	1996	1997	1998	1999	2000	
1. kab Sidoarjo	5.392.723,23	5.698.350,67	4.532.682,05	4.580.671,98	4.760.372,12	4.992.960,01
2. Kab Mojokerto	1.190.420,74	1.222.428,25	1.041.508,54	1.078.829,28	1.103.102,03	1.127.257,77
3. Kab Lamongan	950.534,16	978.060,37	886.854,94	905.166,07	931.021,45	930.327,40
4. Kab Gresik	3.533.375,00	3.705.592,31	3.005.954,69	3.117.478,29	3.302.182,77	3.332.916,61
5. Kab Bangkalan	672.440,37	689.487,68	629.165,18	629.615,92	641.523,26	652.446,48
6. Kota Mojokerto	311.685,82	322.713,22	282.297,34	287.862,44	298.440,72	300.599,91
7. Kota Surabaya	14.446.766,59	15.373.261,89	11.933.442,11	11.903.847,82	12.311.076,00	13.193.678,88
<b>Total</b>	<b>26.497.945,91</b>	<b>27.989.894,39</b>	<b>22.311.904,85</b>	<b>22.503.471,80</b>	<b>23.347.718,35</b>	<b>24.530.187,06</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>3.785.420,84</b>	<b>3.998.556,34</b>	<b>3.187.414,98</b>	<b>3.214.781,69</b>	<b>3.335.388,34</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur Tahun 1996-2000

Pendapatan Perkapita Masing-Masing Kabupaten / Kotamadya atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 Di SWP I  
(GERBANGKERTASUSILA) Propinsi Jawa Timur Tahun 1996-2000 ( Dalam Rupiah)

Kabupaten / Kotamadya	Tahun				
	1996	1997	1998	1999	2000
1. Kab Sidoarjo	4.720.467,32	4.892.774,86	3.802.059,32	3.716.412,76	3.757.864,15
2. Kab Mojokerto	1.403.882,47	1.422.602,67	1.201.716,59	1.266.259,79	1.252.308,30
3. Kab Lamongan	804.958,26	825.063,14	745.967,11	758.321,64	775.784,62
4. Kab Gresik	3.881.272,90	4.029.942,21	3.265.645,34	3.306.273,10	3.450.383,65
5. Kab Bangkalan	926.669,32	941.764,81	857.432,60	840.382,06	841.843,22
6. Kota Mojokerto	2.957.142,91	3.040.591,89	2.635.263,58	2.664.726,78	2.762.189,09
7. Kota Surabaya	6.161.929,35	6.523.807,86	5.028.668,25	4.957.656,07	5.035.254,33
Jumlah	20.856.322,53	21.676.547,44	17.536.752,79	17.510.032,20	17.875.627,37
Rata-rata	2.979.474,65	3.096.649,63	2.505.250,40	2.501.433,17	2.553.661,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur Tahun 1996-2000

Lampiran 8

Perhitungan Indeks Williamson

	(Y <sub>t</sub> -Y <sub>t</sub> ) <sup>2</sup> P <sub>ij</sub> /P SWP I (GERBANGKERTASUSILA)		
	1996	1997	1999
1. kab Sidoarjo	406,679,438,646.63	459,473,192,028.62	292,259,741,828.52
2. Kab Mojokerto	786,825,437,488.73	904,257,762,394.18	540,627,271,580.32
3. Kab Lamongan	1,307,674,558,688.61	1,476,755,123,880.12	852,345,465,975.69
4. Kab Gresik	7969086395	10776082587	4105747266
5. Kab Bangkalan	673,345,023,332.78	770,435,948,023.73	457,722,074,118.90
6. Kota Mojokerto	175,255,641,378.82	195,815,040,585.56	122,468,888,982.90
7. Kota Surabaya	36,720,779,986,835.10	41,631,175,759,560.20	24,589,516,570,766.10
Total	40,078,529,172,765.50	45,448,688,909,059.70	26,859,045,760,518.20

	(Y <sub>t</sub> -Y <sub>t</sub> ) <sup>2</sup> P <sub>ij</sub> /P Wilayah Hinterland (Tanpa Wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik)		
	1996	1997	1998
1. Kab Mojokerto	1053632431	1169783978	2667716628
2. Kab Lamongan	37037312099	38757568552	25464115956
3. Kab Bangkalan	84650177767	90081110701	65059706966
4. Kota Mojokerto	32450975532	34095236264	26950013902
Total	155,192,097,829.01	164,103,699,494.71	120,141,553,452.27

	(Y <sub>t</sub> -Y <sub>t</sub> ) <sup>2</sup> P <sub>ij</sub> /P Pusat-Pusat Pertumbuhan		
	1996	1997	1999
1. Kab Sidoarjo	1,494,237,117,482.47	1,719,772,768,353.74	1,018,905,560,650.59
2. Kab Gresik	3,752,798,757,471.38	4,293,373,456,796.79	2,491,845,404,478.71
3. Kota Surabaya	23,619,466,870,623.90	26,857,771,327,739.20	15,671,722,706,148.90
Total	28,866,502,745,577.80	32,870,917,552,889.70	19,182,473,671,278.20

	2000
1. Kab Mojokerto	2235069655
2. Kab Lamongan	27198477796
3. Kab Bangkalan	77578780851
4. Kota Mojokerto	29078568188
Total	136,090,896,489.95

	2000
1. Kab Sidoarjo	1,119,038,927,267.49
2. Kab Gresik	2,495,383,168,768.55
3. Kota Surabaya	15,956,085,449,583.60
Total	19,570,507,545,619.60

Hasil Perhitungan Indeks Williamson SWP I :

$$1996 = \frac{\sqrt{40.078.529.172.765,50}}{3.785.420,84} = 1,67$$

$$1997 = \frac{\sqrt{45.448.688.909.059,70}}{3.998.556,34} = 1,69$$

$$1998 = \frac{\sqrt{26.859.045.760.518,20}}{3.187.414,98} = 1,63$$

$$1999 = \frac{\sqrt{26.497.991.244.954,50}}{3.214.781,69} = 1,60$$

$$2000 = \frac{\sqrt{28.303.564.696.454,50}}{3.335.388,34} = 1,59$$

Hasil Perhitungan Indeks Williamson SWP I Tanpa Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik :

$$1996 = \frac{\sqrt{155.192.097.829,01}}{1.250.032,44} = 0,31$$

$$1997 = \frac{\sqrt{164.103.699.494,71}}{1.285.075,81} = 0,31$$

$$1998 = \frac{\sqrt{120.141.553.452,27}}{1.135.930,40} = 0,30$$

$$1999 = \frac{\sqrt{129.897.570.246,61}}{1.160.589,48} = 0,31$$

$$2000 = \frac{\sqrt{136.090.896.489,95}}{1.189.634,98} = 0,31$$



Hasil Perhitungan Indeks Williamson Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik Sebagai Pusat-Pusat Pertumbuhan :

$$1996 = \frac{\sqrt{28.866.502.745.577,80}}{7.790.954,94} = 0,69$$

$$1997 = \frac{\sqrt{32.870.917.522.889,70}}{8.259.068,29} = 0,69$$

$$1998 = \frac{\sqrt{19.182.473.671.278,20}}{6.490.692,95} = 0,67$$

$$1999 = \frac{\sqrt{18.560.987.530.679,20}}{6.533.999,36} = 0,65$$

$$2000 = \frac{\sqrt{19.570.507.545.619,60}}{6.791.210,30} = 0,65$$